ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2017

SKRIPSI

Oleh:

DEBBY ISLAMI

NIM: G01216007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	:	Debby Islami
NIM	:	G01216007
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi	:	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Dengan sungguh-sunggguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

1C87DAHF582188135

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Debby Islami

NIM: G01216007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Debby Islami NIM: G01216007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Maret 2020

Pembimbing,

Lilik Rahmawati, S.Si., M.EI

NIP. 198106062009012008

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Debby Islami, NIM: G01216007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 12 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Lilik Rahmawati, M.EI	Siti Maufiqoh, M.EI
NIP. 198106062009012008	NIP. 197608132006042002
Penguji III,	Penguji IV,
H. Abdul Hakim, M.EI	Betty Silfia Ayu Utami, SE., M.SE.
NIP. 197008042005011003	NIP. 198706102019032019

Surabaya, 22 Mei 2020

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Debby Islami
NIM : G01216007
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi
E-mail address : islamidebbysj@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2020
Penulis

Debby Islami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 hingga 2017.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan informan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan BAPENDA, Staff BAPENDA, Kepala Sub Bidang Anggaran I BPKAD, dan Staff Bidang Pendataan dan Penagihan UPT PPD Surabaya Timur.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa wujud nyata dari pemenuhan hak untuk setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah adalah dengan melakukan penggalian sumber dana Pendapatan Asli Daerah, sehingga daerah dianggap mampu untuk mengelola dan mengalokasikannya. Dana Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pemungutan pajak yang merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan setiap warga negara yang bersifat memaksa, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kontribusi dari sektor pajak daerah sangat memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam Pendapatan Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang baik dan potensial dalam menopang Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk memaksimalkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya serta keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak, sehingga penerimaan pajak dari keduanya bisa lebih maksimal dan semakin berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR BAGAN xi
DAFTAR GRAFIK xii
DAFTAR TABEL xiii

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 25
F. Manfaat Penelitian 25
G. Definisi Operasional 26
H. Metode Penelitian 27
I. Sistematika Pembahasan 37

BAB II 39
KERANGKA TEORI 39
A. Pendapatan Asli Daerah 39
B. Pajak 46
C. Pajak Kendaraan Bermotor 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 60

BAB III 62
DATA PENELITIAN 62
A. Keadaan Geografis Provinsi Jawa Timur 62
B. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 62
C. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 70
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 78
E. Data Jumlah Kendaraan Bermotor dan Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Tahun 2013-2017 80

BAB IV 84
ANALISIS DATA 84
A. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur 84
B. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 94

BAB V 109
PENUTUP 109
A. Kesimpulan 109
B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA 113
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

3.1.Logo Pemerintah Provinsi Jawa Timur 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BAGAN

Halaman

3.1.Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GRAFIK

Halaman

3.1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 73

3.2. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 76

3.3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (dalam triliun) 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

3.1.Data Target Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (dalam triliun) 71

3.2.Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (dalam triliun) 72

3.3.Data Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (dalam triliun) 74

3.4.Data Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (dalam triliun) 75

3.5.Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Tahun 2013-2017 (dalam triliun) 78

3.6.Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Tahun 2013-2017 81

3.7.Jumlah Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Tahun 2013-2017 82

4.1.Persentase Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 88

4.2.Persentase Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 92

4.3.Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Jawa Timur Tahun 2013 99

4.4.Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Jawa Timur Tahun 2014 100

4.5.Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Jawa Timur Tahun 2015 101

4.6.Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Jawa Timur Tahun 2016 102

4.7.Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Jawa Timur Tahun 2017 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.8.Rangkuman Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Jawa Timur Tahun 2013-2017 (dalam persen) 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1] Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena dapat melihat sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan dan pembangunan daerah itu sendiri sesuai dengan era saat ini yakni otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk orientasi terhadap pembangunan. Otonomi daerah merupakan hak dimana daerah wajib untuk turut serta melancarkan jalannya pembangunan yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.[2]

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bersumber dari dana perimbangan yang berasal dari APBN dan pinjaman daerah. Pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, sehingga sektor-

[1] Ahmad Yani, "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002) Hlm. 51

[2] Azhari Aziz Samudra, "Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah" (Jakarta: Rajawali Pers. 2015) Hlm. 30-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sektor tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan kemandirian daerah. Sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali dan dimanfaatkan secara maksimal dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.[3]

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki fungsi untuk memuaskan dan memenuhi segala kepentingan umum yang berkaitan dengan masyarakat luas. Fungsi ini dapat tercapai melalui program-program pemerintah daerah yang pembiayaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program-program yang dijalankan pemerintah daerah tidak lain adalah untuk membangun daerah itu sendiri sehingga kesejahteraan seluruh masyarakatnya dapat tercapai. Contoh program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah yang sedang gencar saat ini adalah pembangunan jalan tol yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat melakukan perjalanan dari daerah satu ke daerah lainnya dengan jarak tempuh waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan melakukan perjalanan dengan menggunakan jalur jalan raya pada umumnya. Selain itu, kepentingan masyarakat dapat segera terpenuhi karena lalu lintas jalan tol yang tidak padat, misalnya masyarakat dari daerah yang akan mendistribusikan buah dan sayurnya ke pasar induk Keputran di Surabaya, kini buah dan sayur akan tiba lebih cepat dan konsumen akan mendapatkan buah dan sayur yang lebih segar dan tidak layu.

[3] Ronald Bua Toding, "Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya" 4 No. 1 tahun 2016 Hlm. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota didalamnya. Padatnya penduduk di Provinsi Jawa Timur beriringan dengan padatnya jumlah kendaraan bermotor, seperti sepeda motor, mobil pribadi, dan transportasi umum. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi kedua dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia setelah DKI Jakarta sebanyak 14.706.680 unit dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.[4] Peningkatan ini diakibatkan oleh pentingnya kendaraan bermotor dalam menunjang berbagai aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Masyarakat cenderung menggunakan kendaraan bermotor karena jenis kendaraan ini dinilai lebih efektif untuk mereka kendarai guna mendukung mobilitas masyarakat yang padat. Sebagian besar orang lebih memilih untuk bepergian menggunakan kendaraan bermotor yang lebih efektif dan mampu menjangkau wilayah-wilayah tertentu dibandingkan dengan kereta, pesawat, kapal, dan lain-lain yang hanya dapat diakses di beberapa wilayah dan memiliki waktu khusus untuk keberangkatan. Padatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Perekonomian suatu daerah bergantung terhadap pendapatan pajak. Pajak merupakan sarana untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur

[4] BPS "Statistik Transportasi Darat Tahun 2015" diakses pada tanggal 20 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktifitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan. Selain itu, pajak merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat nantinya digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan insfrastruktur publik di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali Provinsi Jawa Timur yang memiliki penduduk yang padat dan kendaraan bermotor yang juga sangat padat. Padatnya kendaraan bermotor memiliki manfaat tersendiri untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah harus membuat masyarakat percaya bahwa pembayaran pajak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan negara. Pemerintah harus pandai menempatkan diri agar masyarakat turut percaya kepada pegawai pajak atau orang pajak yang ditunjuk untuk melakukan penarikan pajak. Selain itu, sistem pembayaran pajak harus dipermudah sehingga masyarakat terbebas dari kerumitan proses pembayaran pajak yang perlahan-lahan akan meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang perannya sangat strategis untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan dikelola untuk dipergunakan kembali guna memenuhi kebutuhan daerah sehingga tercapai kemakmuran rakyat.[5] Daerah sangat membutuhkan pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berupa

[5] Theresia Woro Damayanti dan Supramono, "Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan" (Yogyakarta: Andi. 2005) Hlm. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pembangunan jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pemerintahan daerah lainnya. Menyadari betapa krusialnya pajak daerah untuk membiayai daerah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, maka kesadaran masyarakat akan pajak harus ditingkatkan kembali.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi negara. Sebesar 70% penerimaan negara berasal dari pajak dan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak.[6] Pajak telah memberikan kontribusi yang besar dan peranan yang penting mulai dari belanja pemerintah, belanja pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran infrastruktur, dan lain-lain. Maka dari itu, sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak merupakan benar adanya.

Pungutan pajak daerah bersifat wajib dari masyarakat oleh pemerintah yang sifatnya dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna membiayai keperluan pemerintahan dan pembangunan.[7] Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan, untuk jenis pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak

[6] Muhammad Bayu Tjahyono, "Reformasi Pajak Rakyat Dapat Apa", (www.pajak.go.id) diakses pada 26 Oktober 2019

[7] Marihot Pahala Siahaan, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Hlm. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.[8]

Tingginya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur salah satunya disebabkan oleh tahap motorisasi yang semakin berkembang. Tahap motorisasi mengakibatkan tingginya jumlah kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan semakin bergantungnya masyarakat terhadap kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil pribadi, dan angkutan umum. Tingginya jumlah kendaraan bermotor ternyata membawa dampak yang baik dalam hal penerimaan daerah. Pajak kendaaan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki peran dalam membantu salah satu unsur pendapatan asli daerah dalam sektor pajak.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.[9] Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beserta gandengannya yang digunakan di darat, dan digerakkan oleh mesin motor atau mesin lainnya yang berfungsi mengubah energi tertentu menjadi tenaga gerak motor. Alat-alat berat, alat-alat besar, dan kendaraan yang dioperasikan di air termasuk kedalam kategori kendaraan bermotor karena dioperasikan dengan menggunakan roda dan motor. Yang termasuk kedalam kategori kendaraan bermotor yang dikenakan pajak

[8] Erly Suandy, "Hukum Pajak", (Jakarta: Salemba Empat, 2016) Hlm. 233-235
[9] Marihot Pahala Siahaan, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Hlm. 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi: (1) sepeda motor; (2) sedan dan sejenisnya; (3) jeep; (4) station wagon dan sejenisnya; (5) bus dan microbus; (6) truk, pick-up, dan sejenisnya; serta (7) alat berat.[10] Seluruh kendaraan bermotor yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan termasuk dalam obyek diatas maka masuk dalam pungutan pajak kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi paling rendah 1% dan paling tinggi 10%. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk angkutan umum, ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil sosial dan keagamaan, mobil pemerintahan, serta segala jenis kendaraan kepolisian dan TNI dikenakan tarif paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%. Sedangkan, tarif pajak kendaraan bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat besar paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh melalui berbagai sumber, salah satunya adalah dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menjadi mobilitas masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi khususnya di Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini tumbuh dan berkembang seiring dengan modernisasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan program yang dapat memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur dapat dilakukan di keramaian seperti pusat-pusat perbelanjaan seperti mall dan minimarket, taman, lapangan, dan event-event tertentu yang

[10] Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengundang antusiasme masyarakat. Selain itu, peran samsat keliling juga sangat membantu penerimaan pajak kendaraan bermotor terlebih untuk mereka yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk datang dan antre di samsat induk. Segala pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak senantiasa untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berpengaruh terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pula.

Pertumbuhan jumlah penduduk merupakan salah satu alasan mengapa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur selalu meningkat. Jawa Timur sebagai provinsi terpadat kedua setelah Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 39.292.972 jiwa.[11] Jumlah ini tentu bukan angka yang sedikit. Maka dari itu, banyaknya jumlah penduduk di Jawa Timur beriringan dengan jumlah kendaraan bermotornya yang selalu meningkat.

Selain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor juga cukup berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Masyarakat menjadikan kendaraan bermotor sebagai mobilitas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kendaraan yang digunakan oleh masyarakat tidak semuanya adalah kendaraan baru. Kendaraan bekas yang memiliki kualitas masih bagus umumnya digemari oleh masyarakat karena harganya yang cukup miring dibandingkan dengan kendaraan baru. Maka dari itu, tidak heran apabila saat ini banyak sekali gerai-gerai dan pameran untuk menjual kendaraan-kendaraan bekas layak pakai.

[11] BPS Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017", (www.jatim.bps.go.id) diakses pada tanggal 29 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendaraan bekas tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan kendaraan baru sehingga keberadaannya cukup diinginkan oleh sebagian masyarakat. Adanya transaksi jual beli kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan dari pemilik lama ke pemilik baru. Perpindahan kepemilikan ini perlu melakukan balik nama atau tukar nama terhadap surat-surat kepemilikan motor menjadi atas nama sendiri. Jika tidak dilakukan perpindahan nama kepemilikan atau balik nama, maka akan sangat merepotkan apabila akan melakukan pembayaran pajak dan perpanjangan karena harus meminjam kartu tanda penduduk (KTP) pemilik sebelumnya. Selain itu, perpindahan nama kepemilikan kendaraan bermotor juga merupakan hak karena kendaraan yang dibeli telah menjadi milik pribadi dan bukan milik orang sebelumnya atau orang lain. Pentingnya mengurus balik nama juga dapat dirasakan karena tidak akan terkena tambahan pajak progresif akibat kendaraan bermotor belum resmi menjadi milik kita di persuratan. Dengan melakukan balik nama maka akan terhindar dari tambahan pajak-pajak kecil tersebut.

Pada bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi maupun badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, termasuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia.[12] Namun, penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri dapat tidak dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor apabila penyerahan kendaraan bermotor tersebut hanya

[12] Marihot Pahala Siahaan, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Hlm. 214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan, diperdagangkan, serta penyerahan kendaraan bermotor untuk digunakan sebagai objek pameran, penelitian, contoh atau display, serta kegiatan olahraga yang bertaraf internasional. Sementara yang menjadi wajib pajak adalah sama dengan subjek pajak, yakni orang pribadi maupun badan yang menerima kendaraan bermotor. Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tabel Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kedua jenis pajak tersebut merupakan jenis pajak daerah/provinsi dimana pungutannya masuk ke dalam penerimaan provinsi. Keduanya dipungut oleh masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur oleh Dinas Pendapatan Daerah kemudian diserahkan kepada Badan Pendapatan (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur dan dilakukan bagi hasil untuk kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/158/KPTS/013/2016. Kedua pajak tersebut memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur sehingga mampu menjadi provinsi yang mandiri dengan mengelola keuangan dengan baik tanpa harus menunggu bantuan dan transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian yang dimaksud dalam hal ini adalah mandiri dalam melakukan perencanaan maupun pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Semakin tingginya tingkat kemandirian suatu provinsi maka akan semakin kuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketahanan ekonomi daerah tersebut dalam menghadapi gejolak perekonomian nasional maupun internasional, seperti pengeluaran pemerintah, kelemahan ekonomi pasar, pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan.[13] Hal ini nantinya akan mempengaruhi besar kecilnya penerimaan bantuan dari pemerintah pusat.

Adanya kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat mengetahui seberapa besar peran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bemotor pada pendapatan daerah, sehingga pengelola pajak daerah setiap tahunnya dapat melakukan evaluasi pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga dapat menjadi pembelajaran selanjutnya. Dari beberapa hal diatas mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, maka penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai kontribusi dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017".

[13] Rahardjo Adisasmita, "Pembiayaan Pembangunan Daerah" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) Hlm. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah terdapat beberapa permasalahan yang muncul mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diantaranya adalah:

1. Jumlah kendaraan berrnotor di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hal ini menyebabkan peningkatan volume kendaraan bermotor di jalan raya.
2. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor memiliki dampak yang baik bagi penerimaan daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah.
4. Pemungutan pajak daerah dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Pemerintah memiliki peran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak sehingga penerimaan pajak daerah dapat dimaksimalkan.
6. Target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017

2. Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini cukup luas, sehingga dibutuhkan batasan masalah supaya penelitian ini fokus dan terarah mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur, sehingga penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2017.
2. Kontribusi dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017?
2. Bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017?

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(PAD) telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa pihak, seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Natalia Ester Rompis, Ventje Ilat, dan Anneke Wengkar yang melakukan penelitian tentang "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus pada SAMSAT Airmadidi)".[14] Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Airmadidi serta menjelaskan seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Airmadidi Provinsi Sulawesi Utara terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan metode regresi dan variabel yang digunakan adalah pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tren yang meningkat. Dapat diketahui bahwa SAMSAT Airmadidi telah baik dalam melakukan pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Kedepannya, perlu usaha untuk terus melakukan inovasi supaya tren selalu menunjukkan peningkatan.

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan variabel pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya untuk mengetahui realisasi pajak

[14] Natalia Ester Rompis, Ventje Ilat, dan Anneke Wengkar, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus pada SAMSAT Airmadidi)", Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi Vol. 15 No. 03 Tahun 2015 diakses pada 29 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan saya adalah penelitian saya menggunakan variabel bea balik nama kendaraan bermotor. Memiliki tujuan untuk mengetahui target dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, sedangkan saya menggunakan deskriptif kualitatif.

2. Nurul Karina dan Novi Budiarso yang melakukan penelitian tentang "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo".[15] Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Data diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor telah efektif dalam mengelola penerimaan pajak, hal ini terjadi seiring dengan kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo yang memberikan keringanan berupa penghapusan denda pajak, sehingga mendorong keingan masyarakat Gorontalo untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun, kontribusi pajak kendaraan bermotor dapat dikatakan cenderung menurun. Hal ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat Gorontalo terhadap kendaraan bermotor dan menurunnya

[15] Nurul Karina dan Novi Budiarso, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo", Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Hlm. 715-722 diakses pada 30 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor yang mempengaruhi kontribusi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan variabel pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya untuk mengetahui penerimaan/realisasi pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian saya menggunakan variabel bea balik nama kendaraan bermotor. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian saya untuk mengetahui target dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

3. Yani Rizal dan Miftahul Hidayah yang melakukan penelitian tentang "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh".[16] Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2012-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan data dengan cara kepustakaan, observasi, interview, dan dokumentasi. Variabel yang digunakan dalam

[16] Yani Rizal dan Miftahul Hidayah, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh", Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Vol. 9 No. 1 Januari 2018 yang diakses pada 30 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini ada tiga, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pendapatan Asli Daerh (PAD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di SAMSAT Aceh Timur mengalami peningkatan, namun kurang berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara petugas pemungutan pajak dan wajib pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan tiga variabel yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan adalah deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan yang saya lakukan adalah penelitian ini menghitung laju pertumbuhan dari variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sedangkan penelitian saya terdapat target dari kedua variabel tersebut.

4. Mohammad Fahmi Basya, Kusni Hidayati, dan Widya Susanti yang melakukan penelitian tentang “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bermotor Roda Dua terhadap Pendapatan Asli Kota Surabaya".[17] Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang dikualitatifkan, sedangkan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara kepada pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Surabaya lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Jawa Timur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan variabel pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tujuannya untuk mengetahui kontribusi dari variabel tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya fokus kepada pajak kendaraan bermotor roda dua, sedangkan penelitian saya fokus pada sepeda motor baik roda dua ataupun tiga, sedan dan sejenisnya, jeep, bus dan minibus, truk dan pick up, station wagon, dan alat besar dan berat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang dikualitatifkan, sedangkan penelitian saya deskriptif kualitatif.

5. Maria Lidya Stephania Djago yang melakukan penelitian tentang "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

[17] Mohammad Fahmi Basya, Kusni Hidayati, dan Widya Susanti, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua terhadap Pendapatan Asli Kota Surabaya" yang diakses pada tanggal 2 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Periode 2009-2013 (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara)".[18] Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang disumbang UPTD Surabaya Utara kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2013 dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis tren. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD Surabaya Utara sangat fluktuatif namun tidak menunjukkan selisih angka yang besar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah variabel pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya yakni mengetahui kontribusi, dan metode yang digunakan deksriptif kualitatif, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini menggunakan analisis tren sebagai tambahan

[18] Maria Lidya Stephania Djago, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Periode 2009-2013 (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara" yang diakses pada 2 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengetahui kontribusi, dan dalam penelitian ini tidak disebutkan target dari variabel-variabel tersebut.

6. Hero Suprayetno yang melakukan penelitian tentang "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara".[19] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bemotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk memenuhi data yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menjabarkan pokok bahasan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bemotor, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah variabel pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya diketahui penerimaannya saja/realisasi, penelitian saya terdapat target dan realisasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan saya wawancara dan dokumentasi.

[19] Hero Suprayetno, "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara" yang diakses pada 2 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Ratu Inggrini, Jenny Morasa, dan Lidia Mawikere yang melakukan penelitian tentang "Analisis Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sulawesi Utara".[20] Tujuan dari adanya penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui proses mekanisme bea balik nama kendaraan bermotor di Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa gambaran umum objek penelitian dan data bea balik nama kendaraan bermotor. Hasil dari adanya penelitian ini menunjukkan bahwa pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara cenderung mengalami penurunan.

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah variabel bea balik nama kendaraan bermotor dan metode yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya terdapat variabel pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mekanisme bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan pada penelitian saya bertujuan untuk menjelaskan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur serta menjelaskan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran umum objek sedangkan teknik penelitian saya adalah wawancara dan dokumentasi.

[20] Ratu Inggrini, Jenny Morasa, dan Lidia Mawikere, "Analisis Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sulawesi Utara", Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13 No. 3 Tahun 2018, Hlm. 303-310

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Ayu Triani Utami yang melakukan penelitian tentang "Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah".[21] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2003-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan regresi linear berganda data runtut (*time series*) dan analisis SWOT. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, dan PDRB sektor transportasi. Hasil analisisnya menyatakan bahwa jumlah penduduk dan PDRB sektor transportasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah variabel pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tujuannya untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaannya adalah penelitian saya terdapat variabel bea balik nama kendaraan bermotor dan terdapat target dan realisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif regresi linear berganda data runtut dan analisis SWOT sedangkan penelitian saya menggunakan deskriptif kualitatif.

[21] Ayu Triani Utami, "Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah", yang diakses pada tanggal 5 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Christina Siwi Maharani yang melakukan penelitian tentang "Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016".[22] Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan efektifitas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan analisis pertumbuhan, efektivitas, kontribusi, dan *trend*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor fluktuatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah variabel pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tujuannya untuk mengetahui kontribusinya dengan menggunakan metode dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan, efektivitas, dan tren dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dalam penelitian saya terdapat

[22] Christina Siwi Maharani, "Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016" yang diakses pada 2 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

target dan realisasi serta metode penelitian yang saya gunakan adalah wawancara sebagai sumber utama.

10. Hasanuddin dan Heince R. N. Wokas yang melakukan penelitian tentang "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara".[23] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Data yang didapatkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara serta dokumentasi buku laporan di Dinas Pendapatan Provinsi Maluku Utara. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara telah efektif, namun belum berkontribusi dengan baik/kurang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah variabel pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tujuan untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian saya terdapat variabel bea balik nama kendaraan bermotor, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas.

[23] Hasanuddin dan Heince R. N. Wokas, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara", yang diakses pada 5 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian saya terdapat target dan realisasi dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017.
2. Untuk menjelaskan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur 2013-2017

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Mengetahui target, realisasi, serta kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur
b. Sebagai referensi dan literatur bahan bacaan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, serta sebagai pedoman bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

c. Sebagai bentuk informasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai peran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap sumber pendapatan daerah yang potensial, yakni pajak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Meningkakan kesadaran masyarakat untuk patuh dan rutin dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

G. Definisi Operasional

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor memiliki arti kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digerakkan oleh mesin motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah energi tertentu menjadi energi gerak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan bermotor tersebut yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar dan berat yang bergerak. Yang termasuk dalam jenis kendaraan bermotor adalah: (1) sepeda motor baik roda dua maupun tiga; (2) sedan dan sejenisnya; (3) jeep; (4) *station wagon* dan sejenisnya; (5) bus dan mikrobus; (6) truk, *pick-up*, dan sejenisnya; dan (7) alat berat.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam surat kendaraan bermotor sebagai akibat dari adanya jual beli, tukar menukar, hibah, dan lain-lain yang menyebabkan perubahan kepemilikan.

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dari suatu daerah yang diperoleh dari sumber-sumber kekayaan daerah berupa pemungutan dan pengelolaan pajak, pemungutan dan pengelolaan retribusi, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah lain yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah lain yang sah dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam berinovasi dan memberikan keleluasaan untuk menggali sumber kekayaan daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang direalisasikan dengan asas desentralisasi.

H. Metode Penelitian

a. Data yang Dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan dalam menunjang penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data primer, data yang didapatkan peneliti secara langsung dengan mengamati apa yang sedang dikerjakan, mendengar apa yang diucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas. Seluruh hal tersebut didapatkan oleh peneliti saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur pada bulan Juli 2019 serta melakukan wawancara ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Data-data tersebut berupa:
   a. Tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
   b. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan penerimaan yang diprioritaskan.
2. Data sekunder, data yang didapatkan peneliti dari sumber yang telah ada dalam bentuk laporan tahunan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur. Data-data tersebut berupa:
   a. Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017 yang kemudian disahkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
   b. Data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017.
   c. Data jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang bersifat kualitatif.

1. Sumber data primer, sumber data yang didapatkan oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada narasumber terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan penulis dari hasil wawancara bersama Staff Bagian Pembayaran dan Penagihan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Staff Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Kepala Sub Bidang Angggaran I Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Sumber data sekunder, sumber data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung, baik melalui laporan atau catatan yang telah diolah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam buku dan laporan tahunan.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa informasi terkait penelitian yang sedang dianalisis kepada pihak yang berkepentingan atau badan yang berwenang yaitu Staff Bagian Pembayaran dan Penagihan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya Timur, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, staff Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Sub Bidang Anggaran I Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti telah mengetahui informasi mengenai pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang terdapat di lampiran.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengambil langsung ke lembaga/instansi yang bersangkutan. Selain itu, berbagai referensi yang berasal dari web-web resmi pemerintahan dan web terpercaya juga digunakan peneliti dalam membantu untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi sumber resmi dimana dokumen dibuat dan dikeluarkan baik oleh lembaga maupun perorangan dengan atas nama lembaga dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur.[24]

d. Teknik Analisis Data

[24] E. Kosim, 1988 dalam Jurnal Wacana Vol. XIII No. 2, 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik analisis data merupakan runtutan cara untuk memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan. Analisis yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak melalui proses statistik dan hitungan lainnya, melainkan berupa pemahaman dan penafsiran atas peristiwa atau interaksi manusia dalam situasi tertentu berdasarkan perspektif dan pandangan dari peneliti itu sendiri. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami objek yang diteliti secara lebih fokus, teratur, dan mendalam. Dalam melakukan penelitian secara kualitatif, peneliti merupakan instrumen penting dalam penelitian. Hal ini berkaitan dengan peran peneliti yang harus terjun sendiri ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi hingga dirasa telah memuaskan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data:

1. Mencari data dari setiap variabel yang bersangkutan dengan penelitian secara online dengan mengunjungi website resmi milik pemerintah.
2. Apabila data yang dibutuhkan kurang memenuhi, maka mencari data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari sumber data dan menemui narasumber.
3. Data yang dibutuhkan adalah data pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur serta jumlah kendaraan bermotor dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek bea balik nama kendaraan bermotor, maka data diambil di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

4. Data yang diambil dari instansi pemerintah harus melalui beberapa prosedur yang harus dijalani, yakni mengurus surat ijin penelitian ke fakultas pada tanggal 18 November 2019 melalui *One Day Service* (ODS) untuk diajukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur.
5. Membawa surat dari fakultas yang ditujukan ke Bakesbangpol pada tanggal 19 November 2019 dengan menyertakan beberapa berkas yang dibutuhkan, seperti proposal dan persetujuan pembimbing untuk mendapat rujukan ke intansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur.
6. Setelah itu akan menerima surat rujukan dari Bakesbangpol kepada instansi yang akan dijadikan tempat penelitian, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur.
7. Membawa surat rujukan dari Bakesbangpol, surat izin penelitian dari fakultas, proposal, dan persetujuan pembimbing ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 November 2019.
8. Setelah mendapat surat persetujuan dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penelitian, maka dapat dilakukan wawancara dan meminta data ke Badan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur terhitung sejak tanggal 20 November 2019 – 20 Februari 2019.

9. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan analisis kualitatif dengan metode deskriptif dan menjelaskan sesuai data yang ada.

e. Teknik Pengolahan Data

Terdapat tiga tahapan dalam melakukan pengolahan data, diantaranya adalah:

1. Reduksi dan Kategorisasi Data

   Melakukan pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi atas data kasar yang diperoleh dan muncul dari data-data di lapangan atas hasil wawancara bersama bersama Staff Bagian Pembayaran dan Penagihan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Staff Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Kepala Sub Bidang Anggaran I Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Data-data yang didapatkan kemudian dikategorikan berdasarkan:

   a. Informan

      - Staff Bagian Pembayaran dan Penagihan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- Staff Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- Kepala Sub Bidang Anggaran I Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

b. Lokasi penelitian

- UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- SAMSAT Induk Manyar
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2. Display Data

Merancang data-data yang diperoleh dalam bentuk metriks baik bagan, *flow chart*, dan lain-lain. Data-data tersebut diantaranya adalah:

- Data penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013-2017.
- Data penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013-2017.
- Data jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Data jumlah pergantian kepemilikan kendaraan/bea balik nama di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan mencakup informasi-informasi penting didalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yakni:

- Target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur.
- Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur.

f. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek penelitian. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan pendekatan multimetode/metode ganda yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan melakukan analisis data.[25] Dasar tujuannya adalah agar penelitian dapat dipahami dengan baik mengingat tingkat kebenaran penelitian yang tinggi karena dilihat dari berbagai sudut pandang.

[25] Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si dalam GEMA Media Informasi dan Kebijakan Kampus, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html yang diakses pada 13 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain:[26]

1. Triangulasi Sumber, membandingkan dan melakukan pengecekan ulang mengenai derajat kepercayaan informasi yang diperoleh peneliti melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Waktu, digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan proses dan perilaku manusia, mengingat perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada teknik triangulasi waktu, peneliti tidak hanya memerlukan satu kali penelitian saja.
3. Triangulasi Teori, memadukan dua atau lebih teori sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih komprehensif.
4. Trianglasi Peneliti, memerlukan dua atau lebih peneliti dalam melakukan penelitian dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai acuan/kriteria penelitian mengingat masing-masing peneliti memiliki gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu fenomena.
5. Triangulasi Metode, usaha pengecekan keabsahan data dan keabsahan penelitian dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data sehingga akan mendapatkan data yang sama.

[26] Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1 April 2010, Hlm. 46-62 diakses pada 13 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kelima jenis teknik triangulasi, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode untuk melakukan pengujian keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun suatu penelitian kualitatif, sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan, penulis menjelaskan secara singkat mengenai alur dan isi penelitian dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teori

Dalam keranga teori, penulis menjabarkan landasan teori tentang penelitian terkait, yakni pendapatan asli daerah, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor .

BAB III Data Penelitian

Dalam data penelitian, penulis menguraikan data yang berkaitan dengan variabel yang diteliti secara objektif. Dalam bab ini data penelitian harus lengkap dan memenuhi untuk diteliti yakni mengenai pajak kendaraan bermotor dan bea

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

balik nama kendaraan bermotor serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

BAB IV Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menjelaskan analisis berdasarkan data penelitian dan dideskripsikan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian dengan pengetahuan yang tepat dan sesuai.

BAB V Penutup

Dalam penutup, penulis memberikan kesimpulan mengenai analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis masih mengalami keterbatasan dalam penelitian sehingga memerlukan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sehingga dapat berguna bagi penulis, masyarakat, lembaga, pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri yang bersumber dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang sah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah adalah untuk memberikan kewenangan dan keleluasaan pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan dalam melaksanakan otonomi daerah yang diwujudkan dengan asas desentralisasi.[27] Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur suatu daerah untuk menilai seberapa besar peningkatan daerah tersebut dan perkembangan ekonomi di daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimanfaatkan untuk realisasi program-program yang direncanakan pemerintah daerah guna memuaskan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang menimpa daerah tersebut, seperti masalah pengangguran, inflasi, dan kemunduran ekonomi.

[27] Christina Ratih P dalam jurnal "Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta" 2010 Hlm. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam konsep otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri sehingga tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Meskipun demikian, pemerintah pusat tidak sepenuhnya lepas tangan dalam membantu keuangan daerah. Sumber pendapatan daerah yang penerimaannya berasal dari pemerintah pusat dapat berbentuk bagi hasil penerimaan pajak pusat dalam subsidi atau bantuan, investasi modal pemerintah pusat di daerah, dan pinjaman. Besarnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka besar pula kebutuhan daerah tersebut dalam membiayai program-program dan pembangunan daerah yang dijadikan prioritas.[28]

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

a. Pajak Daerah

Pajak merupakan peralihan kekayaan rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan menjadi sumber utama dalam pembiayaan negara.[29] Hal tersebut terjadi karena sebagian besar pendapatan yang masuk ke kas negara berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang sifatnya dipaksakan untuk seluruh warga negara baik pribadi maupun badan yang dipungut

[28] Wempy Banga, "Administrasi Keuangan Negara dan Daerah" (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2017) Hlm. 90

[29] Eresco 1974 dalam Erly Suady, "Hukum Pajak" (Jakarta: Salemba Empat, 2016) Hlm. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[30] Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak dikenakan dalam berbagai hal, seperti pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang telah dibayarkan nantinya digunakan untuk membiayai kepentingan negara dan pemerintahan, seperti pembangunan dan infrastruktur publik. Hal itu dapat terwujud apabila masyarakat memiliki pemikiran yang terbuka dan kesadaran penuh akan pentingnya membayar pajak.

Kewenangan pajak dapat dibagi menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau dapat disebut dengan pajak negara wewenang pemungutannya terdapat pada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan, pajak daerah wewenang pemungutannya terdapat pada Pemerintah Daerah yang pelaksanannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah setempat. Pembagian kewenangan pajak tersebut diharapkan mampu membiayai program-program yang diselenggarakan pemerintah dan serta pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesemakmuran rakyat. Kegiatan tersebut dapat

[30] Timbul Hamongan Simanjuntak dan Mukhlis Imam, "Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi" (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012) Hlm. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direalisasikan dengan baik apabila masyarakat sebagai wajib pajak mampu dan konsisten dalam membayar kewajibannya terhadap pajak.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipaksakan bagi orang pribadi maupun badan yang digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah serta pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan daerah demi kesemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki tarif pemungutan yang berbeda antar daerah satu dengan daerah yang lain. Hal ini terjadi karena melihat kondisi dan karakteristik dari masing-masing daerah serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi di daerah tersebut, sehingga di kemudian hari tidak ada permasalahan yang muncul akibat suatu daerah terlalu memaksa untuk melakukan pemungutan pajak yang tinggi namun tidak melihat kemampuan suatu daerah tersebut.

Pajak daerah hanya dipungut dalam wilayah yang masuk kedalam wilayah administrasi. Misalnya, pajak Provinsi Jawa Timur maka pembayaran pajak berlaku bagi wajib pajak atau objek pajak yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Apabila wajib pajak atau objek pajak berada diluar wilayah Jawa Timur, maka harus mengikuti aturan dan tarif yang telah ditetapkan untuk daerah tersebut. Pajak daerah dapat digunakan hanya untuk membiayai program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan, pembangunan, dan kebutuhan lainnya di wilayah daerah saja.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sebagai bentuk pembayaran atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.[31] Pemungutan retribusi daerah sesuai atas dasar hukum pemerintah pusat, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Retribusi dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas sarana atau fasilitas publik yang diberikan pemerintah daerah. Pembayaran retribusi bersifat wajib terhadap pihak-pihak yang mendapatkan izin dan jasa dari pemerintah. Retribusi juga memiliki peran yang krusial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti halnya pajak. Retribusi daerah berkaitan dengan perizinan atas kegiatan yang dilakukan oleh pribadi maupun badan. Ada berbagai jenis retribusi daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan daerah, seperti pelayanan persampahan/ kebersihan, parkir di tepi jalan umum, air bersih, pengujian kendaraan bermotor, tempat penitipan anak, penyedotan kakus, tempat rekreasi dan olahraga, penyeberangan di atas air, pengolahan limbah cair, izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lain.[32]

Umumnya masyarakat menganggap esensi pajak dan retribusi adalah sama. Anggapan ini muncul karena pembayaran retribusi lebih sering dilakukan oleh masyarakat dibandingkan dengan pembayaran

[31] Erly Suandy, "Hukum Pajak", (Jakarta: Salemba Empat, 2016) Hlm. 239
[32] Ibid hlm 240-241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak. Situasi ini terjadi akibat aktivitas sehari-hari yang sering kali menggunakan fasilitas umum. Masyarakat beranggapan bahwa dengan mereka membayar retribusi berarti telah melaksanakan pembayaran wajib untuk pajak. Namun apabila ditelusuri lebih dalam, pajak dan retribusi adalah jenis pemungutan yang berbeda.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam hal ini adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari perusahan-perusahan yang didirikan dan dibangun pemerintah dengan menggunakan uang negara baik sebagian maupun keseluruhan yang berlokasi di suatu daerah yang bersangkutan. Sehingga, pendapatan yang dihasilkan oleh perusahan-perusahan tersebut masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni UU Nomor 33 Tahun 2004. Objek yang termasuk ke dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan undang-undang tersebut adalah:[33]

1) Laba/profit dari penanaman modal pada perusahaan milik negara atau BUMN
2) Laba/profit dari penanaman modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
3) Laba/profit dari penanaman modal pada perusahaan milik swasta dan usaha-usaha milik masyarakat.

[33] Hestanto, "Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Para Cendekiawan" dalam www.hestanto.web.id yang diakses pada 15 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan diatas merupakan objek yang turut serta dalam sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lain-lain yang sah adalah seluruh pendapatan yang didapatkan daerah yang berasal selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer, meliputi dana darurat, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.[34] Pendapatan yang masuk dalam kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah harus memperhatikan hal-hal diantaranya sebagai berikut:[35]

1) Alokasi dana yang diterima sebagai pendapatan daerah dimasukkan ke dalam kategori pendapatan lain-lain.
2) Penganggaran dana yang dilakukan untuk dana otonomi khusus dan bantuan operasional sekolah harus didasarkan pada peraturan menteri keuangan.
3) Pendapatan daerah kabupaten/kota yang berasal dari dana bagi hasil pajak yang diterima pemerintah provinsi didasarkan pada belanja hasil pajak.
4) Pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang dianggarkan dalam APBD.

[34] www.djpk.kemenkeu.go.id yang diakses pada 15 November 2019
[35] Soeradi, "Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) Hlm. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Penerimaan hibah yang berasal dari APBN, pemerintah daerah lainnya, dan sumbangan pihak ketiga yang sah.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 memiliki arti yakni kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yangy.bersifat memaksa berdasarkan asas undang-undang. Dana atas pembayaran pajak tersebut tidak berimbas langsung kepada perorangan maupun badan, namun digunakan untuk keperluan negara yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat. Terjadi perubahan Undang-Undang tentang ketentuan umum perpajakan pada tahun 2009, yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang tetntang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan dampaknya (imbalan) secara langsung dan dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut digunakan untuk kepentingan negara guna untuk kemakmuran masyarakat.[36]

Pajak memiliki beberapa definisi menurut para ahli, antara lain: Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro/adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang langsung dan digunakan untuk melakukan pengeluaran umum.[37] Sejalan dengan Soemitro, Smeets mendeskripsikan pajak dalam bukunya yang berjudul *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951 adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dalam hal ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.[38] Menurut Andriani, pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan kepada/negara dalam arti/wajib bayar dan yang dapat dipaksakan yang terutang pada wajib pembayarannya yang menurut pada peraturan-peraturan,myang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluran umum yang berhubungan dengan tugasdnegara untuk menyelenggarakan program pemerintahan yang di jalankan.[39]

[36] Nur Setyo Wibowo "Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu" 2, no. 4 (2015): 597-602
[37] Erly Suandy, "Hukum Pajak", Jakarta: Salemba Empat 2016, Hlm. 10
[38] Ibid, Hlm 9
[39] Christina Ratih P "Analisis kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Paendapatan Asli Daerah (Studi kasus pemerintahan Kota Yogyakarta)", Hlm. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudulk*An Inguiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nation* pada abad ke-18 yang dikenal dengan sebutan *four cannons* atau *the for maxims*, yakni:[40]

a. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yakni seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan/pemerintah, namun wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan yang berbeda.

b. *Certainly*

Kejelasan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, ketentuan pembayaran, serta tidak mengenal kompromi.

c. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dikenakan atau dipungut pada saat paling baik bagi wajib pajak, yakni saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan dari pajak itu sendiri.

d. *Economic of Collections*

Pemungutan pajak dikenakan seefisien mungkin, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang kurang menguntungkan seperti biaya pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak.

[40] Erly Suandy, "Hukum Pajak", Jakarta: Salemba Empat 2016, Hlm. 25-26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori Pembenaran Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang digunakan untuk membenarkan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat, diantaranya adalah sebagai berikut:[41]

a. Teori Asuransi

Pajak dalam teori asuransi istilahnya disamakan dengan perusahaan asuransi, pajak dibayar oleh masyarakat dan diperuntukkan untuk memperoleh perlindungan dari negara.

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan menjelaskan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada besarnya kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam memperoleh dan menikmati fasilitas maupun jasa yang diberikan pemerintah.

c. Teori Daya Pikul/Gaya Pikul

Teori daya pikul/gaya pikul menjelaskan bahwa dalam pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan para wajib pajak dalam membayar pajak, dengan memperhatikan penghasilan, kekayaan, serta pengeluaran belanja wajib pajak tersebut.

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Negara memiliki hak mutlak untuk melakukan pemungutan pajak dan rakyat memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara.

[41] Ibid Hlm 26-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Teori Daya Beli

Teori ini disamakan dengan pompa, yakni mengambil dari daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian digunakan untuk memelihara hidup masyarakat dengan membawanya kearah tertentu.

4. Fungsi Pajak

a. Fungsi Penerimaan

Fungsi penerimaan dari pajak adalah sebagai sumber penerimaan dana bagi pemerintah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, seperti pengeluaran dalam APBN atau APBD dimana pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang utama.

b. Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk untuk mengatur masyarakat sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh pajak yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu adalah pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk impor untuk melindungi produk-produk dalam negeri.

5. Syarat Pemungutan Pajak

a. Syarat Keadilan

Syarat keadilan memiliki makna yaitu pajak yang dikenakan kepada orang-orang pribadi harus adil dan merata, kemudian pajak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayarkan oleh wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.[42]

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis di Indonesia karena sifatnya yang memaksa, begitu juga dengan hak dan kewajiban wajib pajak dan petugas pajak harus diatur didalamnya.[43]

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan perekonomian, sehingga tidak menganggu kelancaran ekonomi para wajib pajak, hal ini menghindari para wajib pajak yang jatuh miskin akibat kegiatan produksi maupun perdagagangan/perindustrian tergganggu akibat biaya pemungutan pajak yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan kelesuan perekonomian.

d. Syarat Finansial

Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri, sehingga penerimaan pajak dapat masuk kedalam kas negara maupun kas daerah.

6. Pengelompokan Pajak

[42] Ibid Hlm 28-29
[43] Ibid Hlm 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelompokan pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya.[44]

1) Berdasarkan Golongan
   a. Pajak langsung, pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh si wajib pajak dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, seperti Pajak Penghasilan.
   b. Pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2) Berdasarkan Wewenang Pemungutan
   a. Pajak pusat/negara, pajak yang/wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya/dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
   b. Pajak daerah, pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya ada pada Dinas Pendapatan Daerah.
3) Berdasarkan Sifat
   a. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal pada subjeknya yakni harus memerhatikan kondisi/keadaan wajib pajak.
   b. Pajak objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memerhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

[44] Ibid 35-39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga jenis pemungutan pajak, diantaranya adalah:[45]

1. *Self Assessment System*, dalam sistem ini segala halnya ditentukan sendiri oleh yang berwenang yakni wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak dapat menentukan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Berikut ini adalah ciri-ciri dari *self assessment system*.
   a. Wajib pajak harus aktif dalam menyetor, menghitung, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri secara mandiri.
   b. Memiliki wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak itu sendiri.
   c. Tidak ada campur tangan dari pemerintah, pemerintah hanya mengawasi saja.
2. *Official Assessment System*, pemerintah memiliki peran dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Berikut ini adalah ciri-ciri dari *official assessment system*.
   a. Wajib pajak bersifat pasif karena pemerintah turut mengatur pemungutan pajak.
   b. Pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pengenaan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah berkewenangan mengeluarkan surat ketetapan pajak untuk mengetahui besar pajak yang terutang.

[45] Betty Rahayu. "Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul", (2011), Hlm.59-61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *With Holding System*, yang berwenang untuk menentukan besarnya pajak adalah orang ketiga, bukan dari pihak pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan.

8. Tarif Pajak

Penentuan tarif pajak merupakan salah satu upaya untuk mencapai keadilan, seperti syarat pemungutan pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi empat jenis, diantaranya adalah:[46]

a. Tarif Tetap

Tarif tetap merupakan tarif pajak yang besar pengenaannya tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang akan selalu tetap. Contohnya adalah bea materai, berapapun nominalnya tetap dikenakan Rp 1.000.

b. Tarif Proporsional atau Sebanding

Tarif proporsional atau dikenal juga dengan tarif sebanding merupakan tarif pajak yang persentasenya tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya adalah pengenaan PPN sebesar 10% (persen).

c. Tarif Progresif

Tarif progresif merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Pajak yang

[46] Ibid Hlm 67-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

d. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil apabila pengenaan pajaknya meningkat. Pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tariff dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

9. Tujuan Pemungutan Pajak

Didalam mendukung tujuan pemungutan pajak, diperlukan aturan dan sistem yang jelas, adil, transparan, dan didukung oleh pihak yang berwenang dan professional. Tujuan pemungutan pajak dibagi menjadi dua, diantaranya adalah:[47]

a. Tujuan Budgeter

Pajak merupakan alat untuk menggali sumber pendapatan/penerimaan negara maupun daerah sebanyak-banyaknya yang digunakan untuk memenuhi pengeluaran rutin pemerintah dan pembangunan fasilitas untuk masyarakat.

b. Tujuan Reguleren

Tujuan reguleren memiliki fungsi untuk mengatur dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang ada diluar bidang keuangan. Tujuan ini juga bisa digunakan sebagai alat dorong

[47] Irwansyah Lubis, Taat Hukum Pajak (praktis dan mudah taat aturan), Penerbit Mitra Wacana Media, 2018, hal : 36-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi dan alat redistribusian, seperti halnya mengadakan perubahan tarif pajak.

10. Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, hukum pajak merupakan hukum dan sekumpulan aturan yang mengatur tentang pajak dan hubungan antara pemerintah sebagai yang berwenang dalam pemungutan pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak.[48] Hukum pajak digunakan merupakan landasan kerja pemerintah yang sangat penting. Oleh karena itu, hakikat dan kedudukan hukum pada adminitrasi negara digunakan untuk menjalankan fungsi dari peranan didalam pemerintahan dan melindungi masyarakat dalam konteks perorangan wajib pajak terhadap semua sikap dan tindakan pada administrasi negara. Hukum pajak selalu mengalami perkembangan dan tidak dapat lepas dari kepentingan negara maupun kepentingan warga negara.[49] Hukum pajak juga dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan penerimaan pajak kedalam kas negara serta dapat membantu/menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

11. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28

[48] Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungan), (Jakarta: Graha Ilmu, 2010) Hlm 23
[49] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2009, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan pribadi maupun badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iuran tersebut digunakan untuk membiaya pengeluaran rutin pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak daerah.

1. Pajak Provinsi
   a) Pajak Kendaraan Berrmotor
   b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
   c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
   d) Pajak Air Permukaan
   e) Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
   a) Pajak Hotel
   b) Pajak Restoran
   c) Pajak Hiburan
   d) Pajak Reklame
   e) Pajak Penerangan Jalan
   f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
   g) Pajak Parkir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Pajak Air Tanah

i) Pajak Sarang Burung Walet

j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

C. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sendiri merupakan seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang digerakkan oleh mesin motor atau mesin lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak motor.

2. Jenis-jenis Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor meliputi pajak sepeda motor; sedan dan sejenisnya; jeep; *station wagon* dan sejenisnya; bus dan microbus; truk, *pick up* dan sejenisnya; alat-alat berat/besar.

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak Kendaraan Bermotor merupakan orang maupun badan yang memiliki atau menguasasi kendaraan bermotor, sedangkan yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasaan kendaraan bermotor, namun kendaraan bermotor yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan lembaga-lembaga internasional yang memiliki asas timbal balik, serta kereta api dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor.[50]

5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dihitung dari daya berat atau daya angkut kendaraan bermotor berdasarkan jumlah tonase/isi silinder dari kendaraan tersebut. Bobot dinyatakan sebagai koefisien yang nilainya adalah 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu), yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1) Koefisien 1 (satu) memiliki arti kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor masih dalam batas toleransi.
2) Koefisien lebih dari 1 (satu) memiliki arti penggunaan kendaraan bermotor melebihi batas toleransi terhadap kerusakan jalan dan perncemaran lingkungan.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

[50] Azhari Aziz Samudra, "Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah" (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) Hlm. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen).
2) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
3) Angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen).
4) Alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen).

Cara perhitungan dapat dicontohkan sebagai berikut:

Harga jual sedan	= Rp 150.000.000
Koefisien bobot	= 1,4%
Dasar pengenaan pajak	= Rp 150.000.000 x 1,4
	= Rp 210.000.000
Pajak kendaraan bermotor	= 1% x Rp 210.000.000
	= Rp 2.100.000

D. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat adanya jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain-lain yang menyebabkan perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis-jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Yang termasuk dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor adalah jual beli kendaraan bermotor, tukar menukar kendaraan bermotor, hibah/pemberian/hadiah kendaraan bermotor, warisan berupa kendaraan bermotor, serta pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Subjek dan Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi maupun badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, sedangkan yang menjadi objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dihitung dari perkalian antara nilai jual kendaraan bermotor dan bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan bermotor. Besarnya tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Penyerahan kendaraan bermotor pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
2) Penyerahan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya sebesar 1% (satu persen)
3) Penyerahan pertama kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
4) Penyerahan kedua kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)

Perhitungan besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah sebagai berikut:

BBNKB = Tarif BBNKB x Dasar Pengenaan BBNKB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur terletak diantara 111° 0' BT - 114° 4' BT dan 7° 12' LS - 8° 48' LS yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulaun Madura. Jawa Timur daratan memiliki wilayah sebesar 88,70 persen atau 42.541 $km^{2,}$ sedangkan Kepulauan Madura memiliki wilayah sebesar 11,30 persen tau 5422 km^2. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terluas diantara keenam provinsi di Pulau Jawa yang memiliki luas wilayah sebesar 47.922 km^2. Penduduk Provinsi Jawa Timur merupakan yang terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 39.698.631 jiwa (per 2019).[51] Provinsi Jawa Timur berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat.

B. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

1. Profil Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Manyar Kertoarjo No.1 Kota Surabaya. BAPENDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah

[51] BPS Jawa Timur (jatim.bps.go.id) diakses pada tanggal 17 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memiliki tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang keuangan. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan
5. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur

a. Visi

Mewujudkan Jawa Timur lebih sejahtera dan berakhlak melalui kemandirian fiskal dan pelayanan publik.

b. Misi

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Meningkatkan kualitas pelayanan public

3. Logo Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur

Gambar 3.1. Logo Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Bagan 3.1. Struktur Organisasi BAPENDA

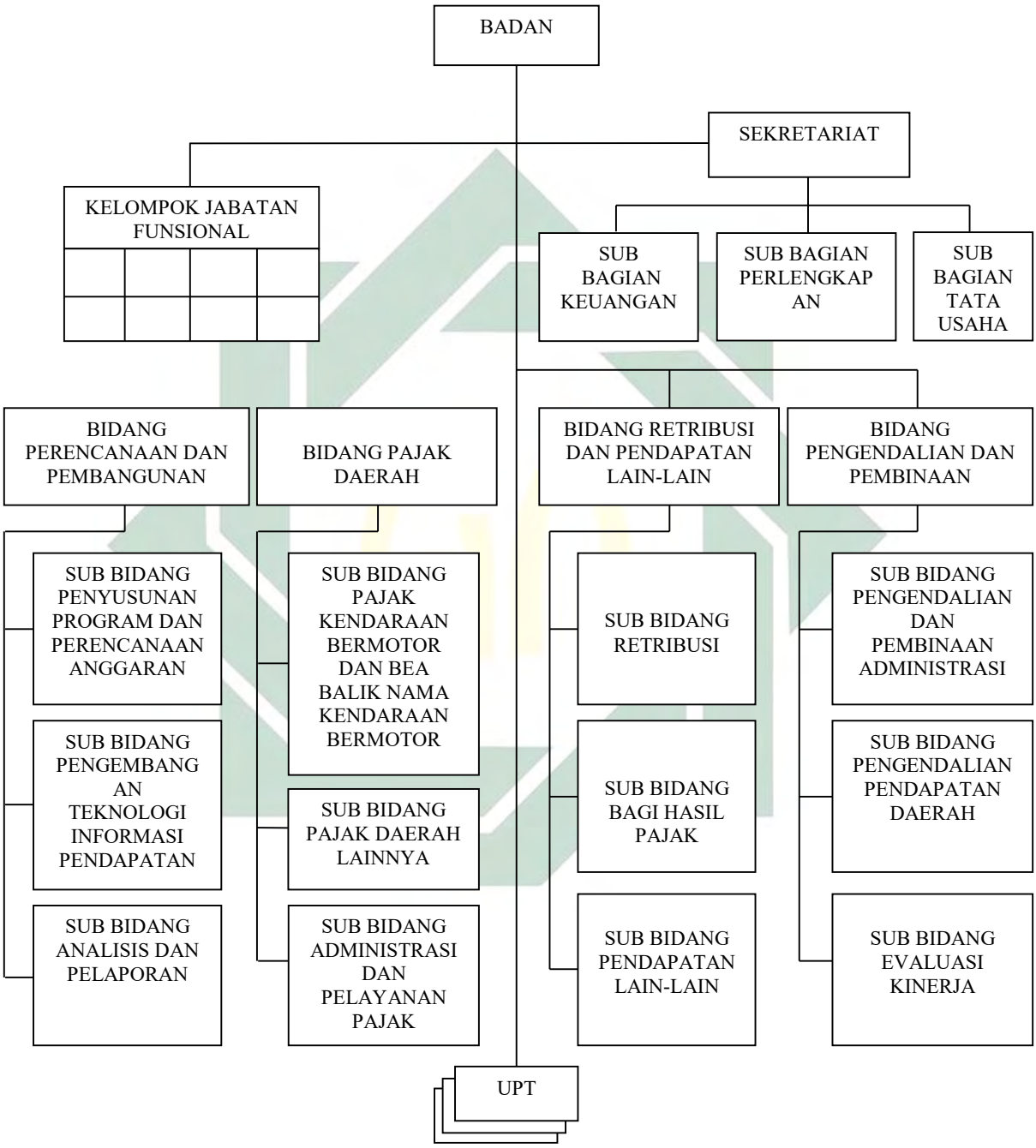

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan dan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 terdiri atas:[52]

a. Badan Pendapatan Daerah
b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Tata Usaha
    2. Sub Bagian Perlengkapan
    3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang perencanaan dan Pengembangan, membawahi:
    1. Sub Bidang Penyusunan Program dan Perencanaan Anggaran
    2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan
    3. Sub Bidang Analisis dan Pelaporan
d. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    2. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
    3. Sub Bidang Admistrasi dan Pelayanan Pajak
e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi:
    1. Sub Bidang Retribusi
    2. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak
    3. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain

[52] Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, membawahi:

1. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Administrasi
2. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
3. Sub Bidang Evaluasi Kinerja

g. UPT Badan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Daerah, dan Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dengan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

a. Tugas dan Fungsi Bagian Kesatu "Badan" Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016

Badan memiliki tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang keuangan. Selain itu Badan memiliki fungsi antara lain:

1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan
2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan
5) Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Tugas dan Fungsi Bagian Keempat "Bidang Pajak Daerah" Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016

Bidang Pajak Daerah memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan pajak daerah. Sedangkan, fungsi dari Bidang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah dari pendataan, pengenaan, penetapan, pembatalan, keringanan, pengurangan, pembayaran, penagihan, insentif, pembebasan dan piutang pajak daerah
2) Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran
3) Perumusan kebijakan teknis pelayanan dan keberatan pajak daerah (doleansi)
4) Perumusan kebijakan teknis sebagai dasar penetapan pajak daerah
5) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, penyusunan, pengolahan, dan penyampaian laporan data subjek dan objek pajak daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak daerah (doleansi) dan pengaduan pelayanan
7) Pengoordinasian kebijakan pajak daerah dengan instansi terkait
8) Pelaksanaan penyusunan kajian pemungutan pajak daerah
9) Perumusan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah pada tahun berjalan
10) Pelakasanaan sosialisasi, publikasi inovasi pelayanan publik pemungutan pajak daerah
11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan pelayanan publik dan pemungutan pajak daerah
12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

c. Tugas Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2016 Pasal 10, antara lain:
1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
2) Menyiapkan bahan penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek pajak serta perkembangannya
3) Menyiapkan bahan penyiapan bahan perumusan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; serta bahan perumusan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menyiapkan bahan penyiapan bahan usulan produk hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5) Menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
6) Menyiapkan bahan data dan kajian untuk mendukung penyusunan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
7) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama perpajakan dengan instansi terkait lainnya
8) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sub Bidang
9) Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugas
10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

C. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang besar. Hal ini tentunya harus didukung dengan pemerintahan yang baik dan tertata supaya dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap potensi yang dimiliki harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan hasil yang baik pula. Berbagai peluang harus digali demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang keberadaannya harus dimaksimalkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 3.1. Data Target Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (dalam triliun)

WILAYAH	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Surabaya Timur	309,071,562,000	337,535,819,000	382,261,343,000	390,056,501,000	388,899,000,000
Surabaya Selatan	247,799,880,000	287,872,545,000	325,582,635,000	328,336,110,000	324,890,700,000
Surabaya Barat	239,869,653,000	272,402,709,000	308,887,208,000	317,500,000,000	320,373,600,000
Surabaya Utara	235,692,247,000	258,039,890,000	291,881,018,000	295,930,465,000	294,770,500,000
Mojokerto	106,585,775,000	126,442,434,000	150,250,000,000	158,883,205,000	166,675,000,000
Sidoarjo	324,865,335,000	372,051,763,000	436,394,000,000	453,910,380,000	466,575,000,000
Gresik	133,692,887,000	157,795,149,000	184,995,089,000	192,050,000,000	199,081,300,000
Jombang	83,455,262,000	98,951,114,000	113,539,766,000	118,650,000,000	121,350,800,000
Bojonegoro	65,348,463,000	77,929,328,000	91,256,759,000	95,750,000,000	97,650,000,000
Tuban	73,560,203,000	86,353,036,000	99,729,603,000	104,800,000,000	106,150,000,000
Lamongan	68,542,908,000	81,570,450,000	96,650,000,000	101,684,871,000	105,450,800,000
Ngawi	49,274,859,000	57,929,165,000	67,187,319,000	71,010,868,000	72,850,300,000
Madiun	82,210,688,000	94,877,538,000	109,611,184,000	115,747,678,000	120,650,500,000
Magetan	50,905,104,000	58,338,120,000	68,573,666,000	73,741,806,000	76,350,800,000
Ponorogo	63,207,625,000	74,165,191,000	86,694,720,000	93,300,000,000	98,250,000,000
Pacitan	21,937,574,000	25,916,741,000	29,794,735,000	31,646,387,000	33,000,000,000
Kediri	165,771,800,000	193,697,427,000	221,100,258,000	231,501,707,000	240,650,500,000
Tulungagung	108,287,318,000	126,128,799,000	143,647,273,000	152,897,792,000	157,500,000,000
Trenggalek	41,164,572,000	48,071,510,000	56,244,361,000	60,105,489,000	61,200,000,000
Nganjuk	65,596,055,000	76,565,803,000	89,067,006,000	94,677,827,000	98,000,000,000
Malang Kota	174,388,856,000	197,204,294,000	223,246,053,000	230,053,822,000	235,400,800,000
Malang Selatan	92,876,038,000	109,269,167,000	129,070,364,000	135,158,606,000	140,700,000,000
Malang Utara & Batu	95,703,630,000	112,777,090,000	130,323,546,000	138,500,000,000	146,601,300,000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Blitar	104,941,227,000	125,181,643,000	146,115,058,000	157,731,000,000	166,600,000,000
Probolinggo	67,700,267,000	79,335,657,000	93,444,939,000	96,500,000,000	100,250,800,000
Lumajang	52,643,272,000	61,426,346,000	70,533,354,000	74,930,140,000	74,950,800,000
Pasuruan	106,426,758,000	126,203,237,000	149,626,750,000	155,559,985,000	163,150,200,000
Situbondo	28,833,558,000	32,405,007,000	37,235,464,000	39,035,000,000	40,400,700,000
Jember	109,187,612,000	127,136,924,000	148,602,419,000	151,870,832,000	157,250,000,000
Bondowoso	26,674,104,000	30,502,801,000	35,072,951,000	37,200,000,000	38,400,600,000
Banyuwangi	103,577,290,000	125,250,474,000	147,780,820,000	155,100,000,000	164,150,000,000
Pamekasan	30,355,319,000	35,053,618,000	43,200,000,000	46,118,910,000	46,650,500,000
Bangkalan	26,900,265,000	31,687,081,000	38,095,676,000	40,900,000,000	43,025,000,000
Sampang	13,737,018,000	16,072,882,000	20,879,823,000	23,170,500,000	24,600,000,000
Sumenep	23,215,016,000	27,859,248,000	33,424,840,000	35,990,119,000	37,550,500,000
JUMLAH	**3,594,000,000,000**	**4,150,000,000,000**	**4,800,000,000,000**	**5,000,000,000,000**	**5,130,000,000,000**

Tabel 3.2. Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (dalam triliun)

WILAYAH	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Surabaya Timur	327,872,206,122	343,453,074,115	390,983,454,533	404,988,368,425	449,551,584,727
Surabaya Selatan	267,460,051,640	293,277,357,887	327,380,026,190	340,517,720,470	373,410,429,376
Surabaya Barat	256,562,448,541	276,973,172,092	314,463,998,741	331,687,376,273	366,925,309,178
Surabaya Utara	250,491,108,709	264,497,063,142	298,088,224,626	307,753,242,677	340,105,197,021
Mojokerto	116,587,525,306	133,842,485,960	156,268,996,530	171,768,651,579	192,140,875,388
Sidoarjo	348,177,982,956	383,071,366,879	444,078,418,944	481,524,366,727	538,947,863,408
Gresik	144,859,659,179	166,056,045,672	188,210,403,599	203,964,243,443	227,964,103,434
Jombang	91,059,406,270	103,088,625,079	116,074,120,262	127,289,429,165	139,465,107,298
Bojonegoro	71,791,748,672	81,968,990,208	93,637,880,495	102,366,998,151	110,788,538,783
Tuban	80,380,323,785	90,150,226,662	101,437,277,645	109,189,061,084	120,833,217,079
Lamongan	75,668,875,132	86,669,046,920	99,321,484,509	107,929,235,481	119,421,917,442
Ngawi	53,943,194,403	60,770,113,133	68,237,212,221	76,080,301,656	83,601,490,616
Madiun	87,950,642,218	97,998,156,441	110,535,351,449	122,700,841,197	136,734,430,849
Magetan	54,818,780,270	61,131,772,792	69,962,533,052	78,776,143,672	88,435,141,045
Ponorogo	68,356,747,848	76,984,040,877	88,662,975,916	99,348,801,137	111,871,743,101
Pacitan	23,940,272,099	27,677,634,298	31,335,804,478	34,069,991,886	37,319,862,693
Kediri	179,844,074,815	198,874,117,176	223,947,866,624	244,046,688,624	273,019,084,851
Tulungagung	117,013,551,903	129,323,412,987	145,943,164,249	160,879,494,623	176,074,033,912

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Trenggalek	44,875,404,938	50,351,185,503	57,455,029,444	63,380,786,150	69,825,522,951
Nganjuk	71,486,271,164	80,244,552,317	91,526,435,534	101,196,630,902	112,994,711,939
Malang Kota	187,557,694,168	201,392,489,306	228,879,018,921	242,852,805,041	271,918,873,202
Malang Selatan	102,821,410,745	115,180,282,548	132,498,591,083	147,012,436,620	162,592,398,919
Malang Utara & Batu	103,871,733,016	115,971,771,730	134,165,514,196	149,829,190,989	169,553,774,562
Blitar	115,024,474,394	129,923,703,115	148,598,490,148	166,766,863,780	186,736,626,212
Probolinggo	76,415,581,814	85,723,570,879	96,594,065,370	105,302,802,808	117,523,367,500
Lumajang	57,828,204,179	64,283,551,993	73,167,493,576	78,990,895,213	85,820,494,667
Pasuruan	115,807,529,756	132,426,609,813	151,430,971,930	166,014,848,057	184,657,919,075
Situbondo	32,299,715,110	35,494,472,963	39,894,777,633	42,752,359,811	47,805,135,016
Jember	121,153,552,038	134,328,057,751	154,467,414,081	164,046,466,035	183,299,794,306
Bondowoso	30,091,245,861	33,057,746,946	37,590,071,980	40,934,717,876	45,871,603,546
Banyuwangi	112,511,413,354	130,290,662,266	150,963,306,635	165,998,683,876	183,861,637,106
Pamekasan	35,300,655,345	40,252,208,307	47,091,482,300	51,125,493,101	57,002,605,642
Bangkalan	29,721,840,431	34,301,158,390	39,866,065,207	44,273,274,627	50,133,017,717
Sampang	15,386,953,743	18,540,954,170	22,207,010,548	25,428,566,172	29,113,764,775
Sumenep	27,258,941,636	31,507,131,768	36,664,387,526	40,159,471,815	44,580,971,099
JUMLAH	**3,896,189,871,560**	**4,309,073,589,585**	**4,911,609,520,175**	**5,300,932,973,143**	**5,889,832,877,975**

Grafik 3.1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

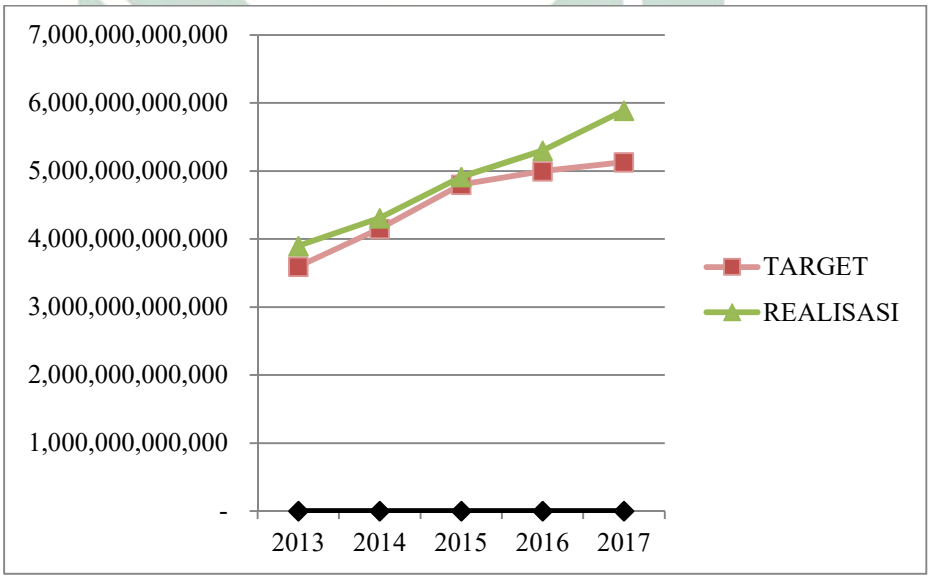

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang ditargetkan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan selama tahun 2013 hinggga 2017 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencapai target dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar Rp 3.896.191.221.560, tahun 2014 sebesar mengalami peningkatan yakni Rp 4.309.076.812.085, tahun 2015 kembali mengalami peningkatan Rp 4.911.629.320.175, tahun 2016 juga kembali meningkat yakni Rp 5.300.947.249.143, dan pada tahun 2017 penerimaan pajak kendaraan bermotor juga meningkat dari tahun sebelumnya yakni Rp 5.889.902.148.435.

2. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 3.3. Data Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (dalam triliun)

WILAYAH	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Surabaya Timur	277.345.668.000	295.645.861.000	277.992.267.000	258.826.777.000	287.224.000.000
Surabaya Selatan	231.504.278.000	263.611.821.000	234.409.573.000	216.033.062.000	236.174.000.000
Surabaya Barat	237.644.182.000	269.419.411.000	244.340.405.000	221.000.000.000	248.512.000.000
Surabaya Utara	231.844.288.000	242.551.060.000	221.443.588.000	210.000.000.000	219.716.000.000
Mojokerto	117.898.855.000	144.836.264.000	135.653.774.000	110.627.334.000	119.250.000.000
Sidoarjo	344.321.615.000	401.348.049.000	369.300.059.000	326.809.000.000	350.265.000.000
Gresik	162.169.792.000	187.112.476.000	158.094.603.000	144.654.000.000	144.250.000.000
Jombang	82.323.874.000	102.101.450.000	88.444.644.000	79.468.200.000	81.950.100.000
Bojonegoro	70.983.235.000	85.244.226.000	79.352.563.000	68.300.000.000	63.280.500.000
Tuban	81.250.263.000	90.354.937.000	76.217.991.000	70.465.500.000	71.600.800.000
Lamongan	78.163.279.000	98.973.650.000	91.613.919.000	79.543.854.000	84.305.600.000
Ngawi	43.265.704.000	46.999.690.000	42.861.922.000	38.334.918.000	37.780.000.000
Madiun	64.963.885.000	71.335.860.000	67.157.885.000	63.912.366.000	65.800.000.000
Magetan	38.013.363.000	41.262.760.000	39.023.245.000	31.642.567.000	36.000.000.000
Ponorogo	45.094.601.000	52.858.725.000	50.343.104.000	46.900.000.000	46.725.000.000
Pacitan	18.936.717.000	22.738.848.000	18.000.991.000	16.738.074.000	16.410.000.000
Kediri	158.208.039.000	160.095.000.000	150.490.776.000	133.000.000.000	145.950.000.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tulungagung	94.261.612.000	98.656.334.000	94.491.171.000	83.500.000.000	80.950.000.000
Trenggalek	36.373.127.000	38.144.432.000	36.065.390.000	32.089.540.000	28.425.000.000
Nganjuk	61.576.904.000	67.780.357.000	62.861.952.000	58.978.287.000	60.330.800.000
Malang Kota	145.344.046.000	170.258.328.000	156.605.732.000	140.623.529.000	155.650.000.000
Malang Selatan	88.120.321.000	109.141.295.000	100.698.083.000	86.907.243.000	91.300.000.000
Malang Utara & Batu	92.815.949.000	110.995.367.000	110.555.797.000	95.640.000.000	103.850.000.000
Blitar	93.593.444.000	112.848.436.000	109.900.021.000	100.455.000.000	98.400.000.000
Probolinggo	70.845.843.000	80.202.130.000	74.877.256.000	67.000.000.000	72.780.000.000
Lumajang	52.322.318.000	58.410.071.000	48.739.454.000	41.950.000.000	41.275.350.000
Pasuruan	113.689.607.000	143.818.047.000	137.936.500.000	114.100.000.000	114.150.750.000
Situbondo	28.116.447.000	26.155.096.000	25.045.329.000	23.200.000.000	28.525.000.000
Jember	111.044.334.000	123.607.008.000	115.837.862.000	98.397.297.000	107.050.000.000
Bondowoso	23.544.206.000	22.459.764.000	20.010.000.000	19.900.000.000	23.570.000.000
Banyuwangi	107.419.301.000	142.783.157.000	138.797.861.000	120.000.000.000	120.950.000.000
Pamekasan	24.116.766.000	30.560.000.000	33.484.525.000	25.596.452.000	24.600.000.000
Bangkalan	31.332.218.000	37.366.970.000	34.991.593.000	29.000.000.000	30.000.000.000
Sampang	17.367.260.000	20.794.931.000	22.057.989.000	19.375.000.000	17.600.000.000
Sumenep	24.184.659.000	29.528.189.000	32.302.176.000	27.032.000.000	25.400.100.000
JUMLAH	**3.500.000.000.000**	**4.000.000.000.000**	**3.700.000.000.000**	**3.300.000.000.000**	**3.480.000.000.000**

Tabel 3.4. Data Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur 2013-2017 (dalam triliun)

WILAYAH	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Surabaya Timur	302.786.601.500	302.698.385.500	261.634.413.800	285.255.343.900	315.664.805.700
Surabaya Selatan	256.587.651.081	260.781.866.100	221.119.910.500	244.974.971.400	252.886.443.000
Surabaya Barat	258.460.693.900	265.366.288.300	233.072.165.600	258.171.675.900	265.579.944.300
Surabaya Utara	250.934.360.000	246.745.931.400	211.330.991.300	236.577.683.100	238.384.388.500
Mojokerto	129.569.096.400	148.132.182.000	126.417.770.900	124.343.750.500	126.413.338.000
Sidoarjo	374.754.195.200	403.673.641.600	347.418.030.550	363.699.362.800	368.832.775.000
Gresik	175.175.102.800	189.398.368.500	149.544.212.800	160.902.220.800	152.243.678.700
Jombang	89.934.314.000	105.115.149.600	86.938.046.100	90.170.382.800	86.351.728.300
Bojonegoro	79.351.915.700	87.252.814.800	76.340.615.600	75.790.344.000	65.347.650.100
Tuban	92.785.827.500	91.793.304.200	74.942.992.600	76.506.615.700	80.150.375.000
Lamongan	87.187.792.400	100.433.858.700	86.317.203.800	88.640.890.600	87.334.881.700
Ngawi	47.256.171.700	48.086.156.200	41.303.685.300	43.532.070.700	40.579.139.000
Madiun	70.584.200.700	75.210.793.300	66.131.862.500	70.439.235.500	70.235.087.300
Magetan	41.065.429.500	43.025.743.800	37.943.776.500	39.622.905.400	38.732.576.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ponorogo	48.309.696.400	54.843.148.200	48.375.905.500	50.911.335.500	48.384.476.800
Pacitan	19.212.226.200	24.194.424.300	17.962.839.500	17.643.044.500	16.880.959.379
Kediri	170.559.738.500	160.261.094.650	142.097.769.300	149.557.677.600	150.525.552.900
Tulungagung	99.064.942.300	98.712.480.400	90.135.855.000	89.504.049.200	82.611.210.800
Trenggalek	38.316.454.500	39.202.895.900	34.260.898.900	33.612.314.900	29.335.441.900
Nganjuk	69.274.471.700	68.646.006.300	61.127.591.200	66.212.680.900	64.644.598.000
Malang Kota	160.622.092.400	172.331.168.000	152.223.200.300	158.986.134.500	170.227.296.200
Malang Selatan	99.688.077.800	109.253.313.100	99.655.443.000	98.906.164.900	96.095.707.900
Malang Utara & Batu	102.716.708.000	112.473.987.800	105.504.419.900	108.559.303.800	112.699.644.800
Blitar	102.503.786.000	113.494.278.350	103.731.513.500	110.456.669.400	102.490.117.100
Probolinggo	81.591.061.400	83.432.789.900	72.004.167.800	77.562.056.100	76.640.094.100
Lumajang	57.950.573.300	58.292.689.900	48.252.087.000	48.348.457.200	41.857.139.500
Pasuruan	124.728.594.000	146.808.522.300	128.092.436.600	128.072.553.800	120.258.581.400
Situbondo	30.630.485.300	28.325.710.600	25.058.543.900	26.957.685.600	30.034.407.300
Jember	122.422.917.600	126.514.801.500	113.048.139.815	111.089.704.200	115.003.652.000
Bondowoso	26.168.417.200	23.841.262.700	21.276.250.000	23.164.714.800	24.670.705.000
Banyuwangi	118.249.117.300	145.138.260.600	130.325.956.500	134.873.344.100	126.961.897.300
Pamekasan	27.259.291.100	34.788.607.500	32.620.188.700	29.489.320.600	27.138.895.500
Bangkalan	34.886.717.000	38.788.773.200	33.482.786.000	34.719.920.700	32.454.714.000
Sampang	19.732.322.000	24.271.179.600	22.002.327.700	21.463.798.300	19.313.518.500
Sumenep	26.617.393.000	33.396.348.500	32.396.030.100	31.856.218.200	28.384.059.800
JUMLAH	**3.836.938.435.381**	**4.064.715.327.300**	**3.534.061.188.065**	**3.710.560.801.900**	**3.705.312.680.779**

Grafik 3.2. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

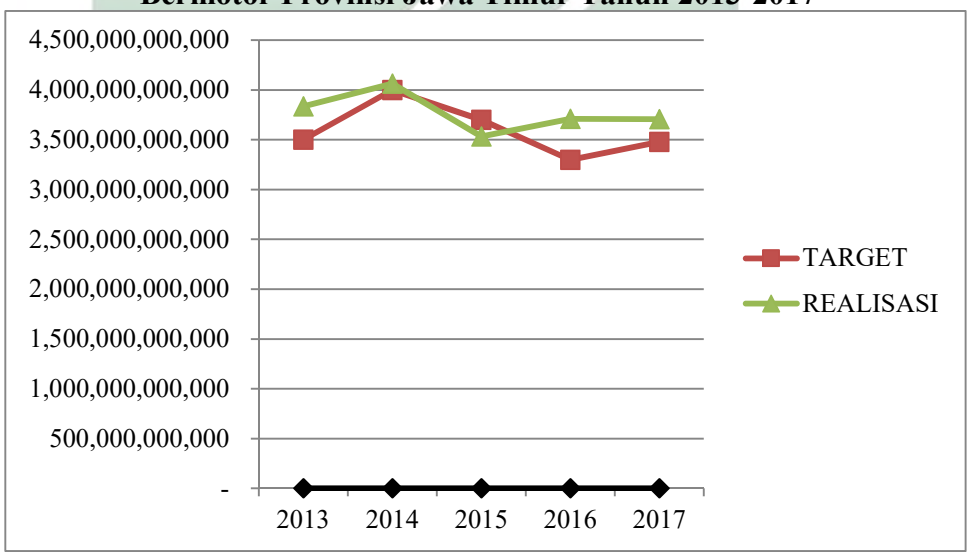

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur, tahun 2013 hingga 2017 fluktuatif dalam penerimaannya. Penerimaan setiap tahunnya selalu memenuhi target yang telah ditetapkan, kecuali pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2013 penerimaan dari bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 3.836.938.435.381, kemudian meningkat pada tahun 2014 Rp 4.064.726.227.300, tahun 2015 mengalami penurunan yakni sebesar Rp 3.534.090.028.065 dan belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 3.700.000.000.000, tahun 2016 kembali meningkat sebesar Rp 3.710.574.601.900, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar Rp 3.705.349.480.779 namun berhasil memenuhi target yang ditetapkan yakni Rp 3.480.000.000.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Tabel 3.5. PAD Jawa Timur Tahun 2013-2017
(dalam triliun)

JENIS PENERIMAAN		2013	2014	2015	2016	2017
PAJAK DAERAH		9.404.933.622.357	11.517.684.926.169	12.497.148.704.551	12.772.227.117.585	14.350.601.626.319
1	Pajak Kendaraan Bermotor	3.896.189.871.560	4.309.073.589.585	4.911.609.520.175	5.300.932.973.143	5.889.832.877.975
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.836.938.435.381	4.064.715.327.300	3.534.061.188.065	3.710.560.801.900	3.705.312.680.779
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.640.013.828.698	1.985.179.965.577	2.201.522.361.438	2.000.191.757.347	2.109.000.178.969
4	Pajak Air Permukaan	31.791.486.717	31.770.800.086	30.116.623.824	33.401.434.400	33.527.009.801
5	Pajak Rokok		1.126.945.243.621	1.819.839.011.049	1.727.140.150.795	2.612.928.878.795
RETRIBUSI DAERAH		106.213.770.752	148.638.035.645	176.559.902.959	133.587.973.920	131.444.291.907
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN		332.020.394.956	342.920.271.075	352.223.333.471	364.325.988.476	374.274.618.110
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		1.736.172.930.958	2.432.973.302.070	2.376.715.733.521	2.547.653.944.816	2.467.857.128.088
PENDAPATAN ASLI DAERAH		**11.579.340.719.022**	**14.442.216.534.959**	**15.402.647.674.503**	**15.817.795.024.797**	**17.324.177.664.424**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatannya juga selalu memenuhi target yang diberikan. Pada tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 11.579.340.719.022 kemudian meningkat pada tahun 2014 yakni sebesar Rp 14.442.216.534.959. Pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan yakni Rp 15.402.647.674.503. Tahun 2016 penerimaannya juga meningkat meskipun target yang diberikan sedikit lebih kecil daripada tahun 2015, yakni sebesar Rp 15.817.795.024.797, kemudian tahun 2017 juga meningkat Rp 17.324.177.664.424.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Bapak Budi Setijono, penerimaan pajak merupakan penerimaan yang diprioritaskan sebab peningkatan dalam penerimaan pajak akan memberikan pengaruh yang baik terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).[53] Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung akan meningkat juga seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya juga selalu memiliki target penerimaan yang hendak dicapai. Hal ini selalu berbeda setiap tahunnya, dilihat dari kondiri dan perencanaan yang akan dilakukan di masa depan. Ibu Yuni Arlini selaku Kepala Sub Bidang Anggaran I Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menjelaskan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

[53] Hasil wawancara dengan Bapak Budi Setijono, S.H., M.Si selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan BAPENDA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuat oleh Bidang Anggaran BPKAD untuk kemudian diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah untuk direalisasikan.[54] Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih menjadi penerimaan terbesar pertama dan kedua dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pajak daerah. Berikut ini adalah grafik penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur.

Grafik 3.3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (dalam triliun)

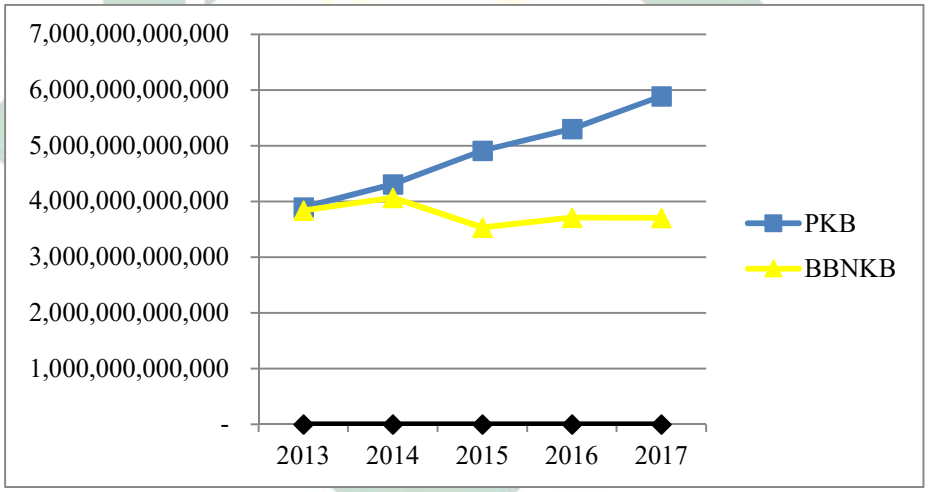

E. Data Jumlah Kendaraan Bermotor dan Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Tahun 2013-2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Devia Hestina Arinda selaku Staff Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal itu dikarenakan jumlah kendaraan

[54] Hasil wawancara dengan Ibu Yuni Arlini, S.E., MM selaku Kepala Sub Bidang Anggaran I BPKAD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermotor di Provinsi Jawa Timur lebih banyak dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan transaksi balik nama kendaraan bermotor. Alasan utamanya adalah setiap tahun seluruh pemilik kendaraan bermotor wajib membayarkan kewajiban pajaknya kepada petugas pajak, sedangkan bea balik nama dilakukan jika hanya terjadi penyerahan kepemilikan kendaraan saja.[55] Namun, objek bea balik nama juga cukup tinggi di Jawa Timur. Ini berarti, masyarakat Jawa Timur memiliki minat yang tinggi untuk membeli kendaraan bermotor bekas. Tingginya penerimaan pajak kendaraan bermotor juga diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur. Berikut ini adalah data jumlah kendaraan bermotor dan objek bea balik nama kendaraan bermotor Jawa Timur tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 3.6. Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Tahun 2013-2017

JENIS KENDARAAN	TAHUN				
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Sedan dan sejenisnya	145.903	151.451	155.973	164.307	170.166
Jeep	94.546	101.282	107.320	117.213	126.848
Station Wagon dan sejenisnya	783.085	903.261	1.006.782	1.129.727	1.257.354
Bus dan Microbus	21.295	23.487	25.222	27.431	29.975
Truck, Pick-up dan sejenisnya	463.464	514.474	549.246	591.226	627.987
Sepeda Motor	11.353.010	12.824.707	13.827.790	15.046.589	15.990.056
Alat Berat	1.842	1.904	1.782	1.936	1.952
Jumlah	**12.863.145**	**14.520.566**	**15.674.115**	**17.078.429**	**18.204.338**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data diatas, jenis kendaraan bermotor yang memiliki jumlah terbanyak di Jawa Timur adalah sepeda motor. Tidak dapat dipungkiri bahwa

[55] Hasil wawancara dengan Devia Hestina Arinda, S.STP selaku Staff Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang fleksibel untuk digunakan melakukan berbagai kegiatan perekonomian. Sepeda motor dapat dijangkau semua kalangan masyarakat. Tidak seperti sedan, jeep, dan station wagon yang umumnya hanya dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan menengah dan menengah keatas. Begitu juga dengan bus dan microbus beserta pick up yang umumnya digunakan untuk kegiatan akomodasi, serta alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang jarang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari, maka dari itu alat-alat berat merupakan jenis kendaraan bermotor dengan jumlah terendah yang dimiliki Jawa Timur. Jadi, hal ini sangat wajar apabila jumlah sepeda motor merupakan yang terbanyak daripada jenis kendaraan bermotor lainnya di Jawa Timur.

Tabel 3.7. Jumlah Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Tahun 2013-2017

TAHUN TETAP	JUMLAH OBYEK
2013	509.997
2014	475.179
2015	607.368
2016	585.096
2017	492.500

Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2013 hingga 2017 perkembangannya fluktuatif. Hal ini tentunya memengaruhi penerimaan pajak daerah. Dapat dilihat bahwa tahun 2013 objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebanyak 509.997. Pada tahun 2014 mengalami penurunan yakni sebesar 475.179. Angka ini naik cukup banyak pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 607.368. Angka ini kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2016 dan 2017, yakni 585.096 dan 492.500.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur

Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan sangat baik dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai kepentingan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat masing-masing daerah perlu menetapkan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah pada hakikatnya adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang. Masyarakat yang membayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan memakmurkan masyarakat daerah setempat.

Pajak daerah juga merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak untuk setiap daerah sehingga dapat melaksanakan otonomi daerahnya sendiri secara mandiri dengan melakukan penggalian dana Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik dalam otonomi daerahnya sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah itu sendiri yang lebih mengerti kondisi dan keadaan daerahnya masing-masing, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perencanaan pembangunan dan perencanaaan anggaran telah dimaksimalkan untuk sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pemungutan pajaknya sesuai dengan *Official Assessment System*, yakni pemerintah memiliki peran untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada sistem ini pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut merupakan penerimaan yang penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur, mengingat penerimaan keduanya merupakan yang tertinggi, sehingga keduanya memiliki peranan yang cukup penting dan krusial dalam mewujudkan pembangunan daerah serta meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum untuk masyarakat.

Setiap tahunnya, pemerintah daerah selalu memiliki rencana pembangunan dan rencana anggaran yang akan dikeluarkan untuk memenuhi pembiayaan daerah, sehingga pemerintah daerah pasti telah memiliki daftar prioritas yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pemerintah daerah juga mengerti kondisi daerahnya sendiri sehingga dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran pasti telah menimbang-nimbang rencana tersebut dari berbagai sisi. Rencana yang dimiliki daerah setiap tahunnya memiliki pengaruh terhadap target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target yang ditetapkan setiap tahun harus dapat dipenuhi untuk mewujudkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan target penerimaan setiap tahunnya oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2013 adalah sebesar Rp 3.594.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 3.896.189.871.560. Tahun 2014 target yang ditetapkan adalah Rp 4.150.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 4.309.073.589.585. Tahun 2015 target yang ditetapkan adalah Rp 4.800.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 4.911.609.520.175. Tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 5.300.932.973.143. Sedangkan pada tahun 2017, target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 5.130.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 5.889.832.877.975. Jika dilihat dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, penerimaannya baik karena seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan.

Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya di wilayah Jawa Timur. Jika jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya terus meningkat, maka penerimaan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor juga akan meningkat. Dengan meningkatnya penerimaan pajak tersebut, maka dapat membantu penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghitung persentase penerimaan atau realisasi dari Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017 yang telah ditargetkan, maka dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

(realisasi : target) x 100

Perhitungan persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut.

Tahun 2013 = (Rp 3.896.189.871.560 : Rp 3.594.000.000.000) x 100

= 108,41%

Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur tahun 2013 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 108,41%.

Tahun 2014 = (Rp 4.309.073.589.585 : Rp 4.150.000.000.000) x 100

= 103,83%

Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur tahun 2014 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 103,83%.

Tahun 2015 = (Rp 4.911.609.520.175 : Rp 4.800.000.000.000) x 100

= 102,33%

Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur tahun 2015 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 102,33%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2016 = (Rp 5.300.932.973.143 : Rp 5.000.000.000.000) x 100

= 106,02%

Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur tahun 2016 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 106,02%.

Tahun 2017 = (Rp 5.889.832.877.975 : Rp 5.130.000.000.000) x 100

= 114,81%%

Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur tahun 2017 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 114,81%.

Untuk mengetahui persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017, dapat dilihat pula pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Persentase Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
2013	3.594.000.000.000	3.896.189.871.560	108,41
2014	4.150.000.000.000	4.309.073.589.585	103,83
2015	4.800.000.000.000	4.911.609.520.175	102,33
2016	5.000.000.000.000	5.300.932.973.143	106,02
2017	5.130.000.000.000	5.889.832.877.975	114,81

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 hingga 2017 telah memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2013 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor telah memenuhi target yakni sebesar 108,41%. Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami penurunan yakni 103,83%. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan yakni 102,33%. Kemudian meningkat pada tahun 2016 yakni sebesar 106,02% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 yakni sebesar 114,81%.

Dalam pemenuhan target Pajak Kendaraan Bermotor, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting. Bagaimana pemerintah memberikan fasilitas dan pelayanan yang memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini yang berkewenangan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah memberikan kemudahan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan di gerai minimarket, samsat keliling yang biasanya ada di tempat keramaian seperti pasar dan taman, serta samsat *corner* yang ada di pusat perbelanjaan. Kemudahan transaksi yang diberikan oleh BadanPendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur semata-mata untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur juga harus memperhatikan program seperti sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur bisa lebih maksimal, karena umumnya wajib pajak masih belum patuh dan menyadari akan pentingnya dan besarnya manfaat yang dapat diambil dari pemungutan pajak.

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2013 adalah sebesar Rp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.500.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 3.836.938.435.381. Tahun 2014 target yang ditetapkan adalah Rp 4.000.000.000.000 dan realisasi yang didapatkan adalah Rp 4.064.715.327.300. Namun, pada tahun 2015 penerimaan atau realisasi dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan yakni Rp 3.700.000.000.000 dan realisaasinya adalah Rp 3.534.061.188.065. Pada tahun 2016 kembali mampu memenuhi target yang ditetapkan yakni Rp 3.300.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 3.710.560.081.900. Kemudian tahun 2017 juga mampu memenuhi target yakni Rp 3.480.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 3.705.312.680.779.

Jika dilihat dari penerimaan diatas, maka hanya satu tahun saja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yakni pada tahun 2015 dimana jumlah objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebanyak 607.368. Cara untuk menghitung persentase realisasi yang berhasil didapatkan dari target yang telah ditetapkan adalah sama dengan Pajak Kendaraan Bermotor diatas, yakni:

(realisasi : target) x 100

Perhitungan persentase realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut.

Tahun 2013 = (Rp 3.836.938.435.381 : Rp 3.500.000.000.000) x 100

= 109,63%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur tahun 2013 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 109,63%

Tahun 2014 = (Rp 4.064.715.327.300 : Rp 4.000.000.000.000) x 100

= 101,62%

Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur tahun 2014 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 101,62%

Tahun 2015 = (Rp 3.534.061.188.065 : Rp 3.700.000.000.000) x 100

= 95,52%

Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur tahun 2015 belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 95,52%

Tahun 2016 = (Rp 3.710.560.801.900 : Rp 3.300.000.000.000) x 100

= 112,44%

Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur tahun 2016 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 112,44%

Tahun 2017 = (Rp 3.705.312.680.779 : Rp 3.480.000.000.000) x 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

= 106,48%

Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur tahun 2017 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 106,48%

Untuk mengetahui persentase realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017, dapat dilihat pula pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Persentase Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
2013	3.500.000.000.000	3.836.938.435.381	109,63
2014	4.000.000.000.000	4.064.715.327.300	101,62
2015	3.700.000.000.000	3.534.061.188.065	95,52
2016	3.300.000.000.000	3.710.560.801.900	112,44
2017	3.480.000.000.000	3.705.312.680.779	106,48

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 hingga 2017 sudah baik dan mampu memenuhi target yang ditetapkan. Hanya ada satu tahun yakni 2015 dimana realisasi dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2013, persentase realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 109,63%. Tahun 2014 realisasinya sebesar 101,62%. Pada tahun 2015, realisasinya belum mampu memenuhi target yakni sebesar Rp 95,52%. Ketidakmampuan mencapai target di tahun 2015 disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat ditengah tekanan biaya energy, lemahnya nilai tukar rupiah, serta naiknya harga BBM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersubsidi. Tahun 2016 penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kembali mampu memenuhi target yang ditetapkan yakni 112,44%, serta tahun 2017 sebesar 106,48%.

Dalam penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang dikenakan adalah setiap adanya penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat dari kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain-lain yang menyebabkan adanya perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor. Langkah-langkah yang dilakukan jika akan melakukan balik nama kendaraan bermotor adalah: 1) mendatangi SAMSAT dengan membawa KTP, STNK, BPKB, dan bukti pembelian kendaraan bermotor; 2) melakukan pengecekan fisik kendaraan bermotor oleh petugas SAMSAT yang bersangkutan; 3) mengisi form balik nama kendaraan bermotor dengan data pemilik baru; 4) melakukan pendaftaran balik nama STNK; 5) melakukan pembayaran pajak; 6) mengambil STNK yang sudah jadi. Langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan balik nama memang cukup panjang, namun hal ini cukup mudah untuk dilakukan mengingat saat ini SAMSAT telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai sehingga dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih banyak jika dibandingkan dengan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat diketahui karena cara pembayaran yang dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor lebih efektif dan efisien. Pembayarannya tidak perlu datang ke SAMSAT induk dan mengantri panjang. Banyak sekali inovasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembangkan pemerintah daerah untuk memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sehingga tidak perlu mengantri lama. Pembayaran Pajak Kendaraan Berrmotor dapat dilakukan di gerai-gerai minimarket di seluruh Indonesia yang cenderung dekat dengan rumah, SAMSAT corner yang berada di pusat perbelanjaan, SAMLING (SAMSAT Keliling) yang berada di kelurahan-kelurahan, taman, dan pasar. Tidak hanya itu saja, ada SAMSAT Drive Thru, SAMSAT Payment Point, E-SAMSAT, SAMSAT Kepulauan, pembayaran melalui ATM, serta E-SMART yang digunakan untuk pembayaran perpanjangan STNK lima tahunan khusus di Jawa Timur. Hal ini tentunya sangat memudahkan para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sekaligus menaikkan penerimaan daerah. Sedangkan, untuk melakukan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus dilakukan di SAMSAT induk karena ada pengecekan fisik kendaraan bermotor, pengisian form, pergantian plat nomor, dan penerimaan STNK baru. Jadi, hal ini wajar apabila penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi dibandingkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat fasilitas dan inovasi yang diberikan juga berbeda. Kemudahan transaksi, keefektifan, dan inovasi yang diberikan sangat memengaruhi penerimaan daerah.

B. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang merupakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ada berbagai jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia, yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan lain-lain termasuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Penerimaan dari pajak sangat berperan dalam penerimaan negara dan daerah. Banyak sekali manfaat yang didapat dari penerimaan pajak. Pajak dapat memenuhi segala pengeluaran pemerintah serta mengatur perekonomian negara maupun daerah. Pajak juga dapat memberikan berbagai fasilitas kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Selain fasilitas dan pelayanan, pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa subsidi dari hasil pajak, seperti subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, subsidi berupa pelatihan, dan lain-lain.

Salah satu fungsi pajak daerah adalah untuk membiayai dan memfasilitasi adanya pembangunan. Anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan sangatlah tinggi, sehingga diperlukan rencana yang matang dan biaya yang tinggi juga untuk mewujudkan rencana tersebut. Setiap daerah pasti telah mempersiapkan rencana pembangunan beserta anggarannya jauh-jauh hari di dalam rencana pembangunan daerah. Sehingga, setiap tahunnya daerah mempunyai target penerimaan yang telah ditetapkan untuk mendukung adanya program-program pembangunan yang akan dilaksanakan daerah tersebut.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang penerimaannya sangat diandalkan untuk penerimaan daerah, khususnya Provinsi Jawa Timur. Perlu diketahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa subjek dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan objeknya adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan objeknya adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. Wajib pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pemilik atau penguasa kendaraan bermotor.

Adapun dari total penerimaaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 yang terealisasi telah mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 11.579.340719.022. Nilai tersebut mendapat sumbangan dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 3.896.189.871.560 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 3.836.938.435.381. Tahun 2014 PAD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 14.442.216.534.959 dengan mendapat sumbangan dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 4.309.073.589.585 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 4.064.715.327.300. Pada tahun 2015, Provinsi Jawa Timur menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya sendiri sebesar Rp 15.402.647.674.503 yang berasal dari Kendaraan Bermotor Rp 4.911.609.520.175 dan Bea Balik Kendaraan Bermotor sebesar Rp 3.534.061.188.065. Tahun 2016, PAD Jawa Timur mencapai Rp 15.817.795.024.797 yang memperoleh sumbangan dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 5.300.932.973.143 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 3.710.560.801.900. Sedangkan tahun 2017,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAD Jawa Timur memperoleh dana sebesar Rp 17.324.177.664.424 yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah Rp 5.889.832.877.975 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Rp 3.705.312.680.779.

Pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan apa yang dimiliki oleh daerah tersebut dengan menggali sumber-sumber dana yang dapat digali. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan fasilitas dan layanan masyarakat serta pembangunan-pembangunan infrastruktur. Tujuan lainnya yakni diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional.

Pembangunan-pembangunan yang dilakukan di daerah memiliki peran yang penting dalam mengupayakan peningkatan pembangunan bertaraf nasional. Pada pembangunan daerah, peranan dari masyarakat sangat diperlukan. Penyaluran dana yang berasal dari pajak daerah yang digunakan untuk melakukan berbagai pembangunan berasal dari masyarakat. Berdasarkan data, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2013 hingga 2017 sangat baik. Hal ini tentunya berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur yang baik pula. Adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan fisik dan non fisik di Provinsi Jawa Timur. Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan berupa infrastruktur dan sarana prasarana yang diberikan pemerintah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Aksi nyata dari pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah berupa perbaikan jalan raya, pelebaran jalan, pembangunan fasilitas umum, dan lain-lain. Sedangkan, pembangunan non fisik dilakukan dengan pemberian layanan kepada masyarakat. Pembangunan non fisik mengutamakan pada sumber daya manusia. Pembangunan non fisik berupa peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, layanan pendidikan, bantuan kepada masyarakat miskin, sosialisasi, dan lain-lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik fisik maupun non fisik.

Adapun kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menjelaskan persentasenya setiap tahunnya yakni 2013 hingga 2017. Dengan menghitung kontribusi ini, maka kita dapat mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Cara menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Per Tahun}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

1. Kontribusi Tahun Anggaran 2013

   a. Pajak Daerah $= \frac{9.404.933.622.357}{11.579.340.719.022} \times 100\% = 81{,}222\%$

      1) PKB $= \frac{3.896.189.871.560}{11.579.340.719.022} \times 100\% = 33{,}648\%$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) BBNKB $= \frac{3.836.938.435.381}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 33,136%

3) PBBKB $= \frac{1.640.013.828.698}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 14,163%

4) PAP $= \frac{31.791.486.717}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 0,003%

5) Pajak Rokok $= \frac{0}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 0%

b. Retribusi Daerah $= \frac{106.213.770.752}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 0,917%

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan $= \frac{332.020.394.956}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 2,867%

d. Lain-Lain PAD yang Sah $= \frac{1.736.172.930.958}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 14,994%

Tabel 4.3. Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Jawa Timur Tahun 2013

KOMPONEN PAD		REALISASI (dalam triliun)	KONTRIBUSI (%)
a. Pajak Daerah		9.404.933.622.357	81,222%
1)	PKB	3.896.189.871.560	33,648%
2)	BBNKB	3.836.938.435.381	33,136%
3)	PBBKB	1.640.013.828.698	14,163%
4)	PAP	31.791.486.717	0,003%
5)	Pajak Rokok	-	0%
a. Retribusi Daerah		106.213.770.752	0,917%
b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		332.020.394.956	2,867%
c. Lain-Lain PAD yang Sah		1.736.172.930.958	14,994%
TOTAL PAD		**11.579.340.719.022**	**100%**

Pada tahun 2013, Pajak Daerah berkontribusi sebesar 81,222% kepada Pendapatan Asli Daerah dengan mendapatan sumbangan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 33,648%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 33,136%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 14,163%, dan Pajak Air Permukaan sebesar 0,003%. Sedangkan Retribusi Daerah berkontribusi sebesar 0,917% angka ini berada jauh dibawah pajak daerah serta juga masih berada dibawah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebesar 2,867% serta Lain-Lain PAD yang sah sebesar 14,994%.

2. Kontribusi Tahun Anggaran 2014

a. Pajak Daerah $= \frac{11.517.684.926.169}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 79,750%

1) PKB $= \frac{4.309.073.589.585}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 29,837%

2) BBNKB $= \frac{4.064.715.327.300}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 28,145%

3) PBBKB $= \frac{1.985.179.965.577}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 13,746%

4) PAP $= \frac{31.770.800.086}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 0,220%

5) Pajak Rokok $= \frac{1.126.945.243.621}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 7,803%

b. Retribusi Daerah $= \frac{148.638.035.645}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 1,029%

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan $= \frac{342.920.271.075}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 2,374%

d. Lain-Lain PAD yang Sah $= \frac{2.432.973.302.070}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 16,846%

Tabel 4.4. Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Jawa Timur Tahun 2014

KOMPONEN PAD		REALISASI (dalam triliun)	KONTRIBUSI (%)
a. Pajak Daerah		11.517.684.926.169	79,750%
1)	PKB	4.309.073.589.585	29,837%
2)	BBNKB	4.064.715.327.300	28,145%
3)	PBBKB	1.985.179.965.577	13,746%
4)	PAP	31.770.800.086	0,220%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Pajak Rokok	1.126.945.243.621	7,803%
b. Retribusi Daerah	148.638.035.645	1,029%
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	342.920.271.075	2,374%
d. Lain-Lain PAD yang Sah	2.432.973.302.070	16,846%
TOTAL PAD	**14.442.216.534.959**	**100%**

Pada tahun 2014, penerimaan dari Pajak Daerah mencapai 79,75% dari total penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur. Angka ini disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 29,837%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 28,145%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 13,746%, Pajak Air Permukaan sebesar 0,220%, serta Pajak Rokok sebesar Rp 7,803%. Penerimaan dari Retribusi Daerah menyumbang sebesar 1,029% dari total PAD, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2,374% dan penerimaan dari Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 16,846%.

3. Kontribusi Tahun Anggaran 2015

a. Pajak Daerah $= \frac{12.497.148.704.551}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 81,136%

1) PKB $= \frac{4.911.609.520.175}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 31,888%

2) BBNKB $= \frac{3.534.061.188.065}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 22,945%

3) PBBKB $= \frac{2.201.522.361.438}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 14,293%

4) PAP $= \frac{30.116.623.824}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 0,196%

5) Pajak Rokok $= \frac{1.819.839.011.049}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 11,815%

b. Retribusi Daerah $= \frac{176.559.902.959}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 1,146%

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang $= \frac{352.223.333.471}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 2,287%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dipisahkan

d. Lain-Lain PAD yang Sah $= \frac{2.376.715.733.521}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 15,431%

Tabel 4.5. Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Jawa Timur Tahun 2015

KOMPONEN PAD	REALISASI (dalam triliun)	KONTRIBUSI (%)
a. Pajak Daerah	12.497.148.704.551	81,136%
1) PKB	4.911.609.520.175	31,888%
2) BBNKB	3.534.061.188.065	22,945%
3) PBBKB	2.201.522.361.438	14,293%
4) PAP	30.116.623.824	0,196%
5) Pajak Rokok	1.819.839.011.049	11,815%
b. Retribusi Daerah	176.559.902.959	1,146%
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	352.223.333.471	2,287%
d. Lain-Lain PAD yang Sah	2.376.715.733.521	15,431%
TOTAL PAD	**15.402.647.674.503**	**100%**

Untuk tahun 2015, penerimaan terbesar dari komponen PAD yakni Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah menyumbang sebesar 81,136% dari PAD. Angka ini berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 31,888%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 22,945%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 14,293%, Pajak Air Permukaan sebesar 0,196%, serta Pajak Rokok sebesar 11,815%. Retribusi Daerah menyumbang penerimaan PAD sebesar 1,146%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2,287%, serta Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 15,431%.

4. Kontribusi Tahun Anggaran 2016

a. Pajak Daerah $= \frac{12.772.227.117.585}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 80,746%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) PKB $= \frac{5.300.932.973.143}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 33,512%

2) BBNKB $= \frac{3.710.560.801.900}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 23,458%

3) PBBKB $= \frac{2.000.191.757.347}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 12,645%

4) PAP $= \frac{33.401.434.400}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 0,211%

5) Pajak Rokok $= \frac{1.727.140.150.795}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 10,919%

b. Retribusi Daerah $= \frac{133.587.973.920}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 0,845%

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan $= \frac{364.325.988.476}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 2,303%

d. Lain-Lain PAD yang Sah $= \frac{2.547.653.944.816}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 16,106%

Tabel 4.6. Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Jawa Timur Tahun 2016

KOMPONEN PAD	REALISASI (dalam triliun)	KONTRIBUSI (%)
a. Pajak Daerah	12.772.227.117.585	80,746%
1) PKB	5.300.932.973.143	33,512%
2) BBNKB	3.710.560.801.900	23,458%
3) PBBKB	2.000.191.757.347	12,645%
4) PAP	33.401.434.400	0,211%
5) Pajak Rokok	1.727.140.150.795	10,919%
b. Retribusi Daerah	133.587.973.920	0,845%
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	364.325.988.476	2,303%
d. Lain-Lain PAD yang Sah	2.547.653.944.816	16,106%
TOTAL PAD	**15.817.795.024.797**	**100%**

Tahun 2016, penerimaan Pajak Daerah masih menjadi yang terbesar dalam menyumbang penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur, yakni sebesar 80,746%. Angka ini berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

33,512%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 23,458%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesarr 12,645%, Pajak Air Permukaan sebesar 0,211%, serta Pajak Rokok sebesar 10,919%. Retribusi Daerah menyumbang sebesar 0,845%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2,303%, serta Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 16,106%.

5. Kontribusi Tahun Anggaran 2017

a. Pajak Daerah $= \frac{14.350.601.626.319}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 82,836%

1) PKB $= \frac{5.889.832.877.975}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 33,998%

2) BBNKB $= \frac{3.705.312.680.779}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 21,388%

3) PBBKB $= \frac{2.109.000.178.969}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 12,174%

4) PAP $= \frac{33.527.009.801}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 0,194%

5) Pajak Rokok $= \frac{2.612.928.878.795}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 15,083%

b. Retribusi Daerah $= \frac{131.444.291.907}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 0,759%

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan $= \frac{374.274.618.110}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 2,160%

d. Lain-Lain PAD yang Sah $= \frac{2.467.857.128.088}{11.579.340.719.022}$ x 100% = 14,245%

Tabel 4.7. Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Jawa Timur Tahun 2017

KOMPONEN PAD		REALISASI (dalam triliun)	KONTRIBUSI (%)
a. Pajak Daerah		14.350.601.626.319	82,836%
1)	PKB	5.889.832.877.975	33,998%
2)	BBNKB	3.705.312.680.779	21,388%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3)	PBBKB	2.109.000.178.969	12,174%
4)	PAP	33.527.009.801	0,194%
5)	Pajak Rokok	2.612.928.878.795	15,083%
b. Retribusi Daerah		131.444.291.907	0,759%
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		374.274.618.110	2,160%
d. Lain-Lain PAD yang Sah		2.467.857.128.088	14,245%
TOTAL PAD		**17.324.177.664.424**	**100%**

Pada tahun 2017, penerimaan Pajak Daerah berkontribusi sebesar 82,836% yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 33,998%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 21,388%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp 12,174%, Pajak Air Permukaan sebesar 0,194%, serta Pajak Rokok sebesar 15,083%. Retribusi Daerah berkontribusi terhadap PAD sebesar 0,759%, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2,160% dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 14,245%.

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat disimpulkan kontribusi dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8. Rangkuman Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Jawa Timur Tahun 2013-2017 (dalam persen)

Komponen PAD		2013	2014	2015	2016	2017
a. Pajak Daerah		81,222%	79,750%	81,136%	80,746%	82,836%
1)	PKB	33,648%	29,837%	31,888%	33,512%	33,998%
2)	BBNKB	33,136%	28,145%	22,945%	23,458%	21,388%
3)	PBBKB	14,163%	13,746%	14,293%	12,645%	12,174%
4)	PAP	0,003%	0,220%	0,196%	0,211%	0,194%
5)	Pajak Rokok	0,000%	7,803%	11,815%	10,919%	15,083%
b. Retribusi		0,917%	1,029%	1,146%	0,845%	0,759%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah					
c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,867%	2,374%	2,287%	2,303%	2,160%
d. Lain-Lain PAD yang Sah	14,994%	16,846%	15,431%	16,106%	14,245%
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Pajak Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan terbesar bagi daerah sehingga mampu membiayai pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2013 hingga 2017 sangat baik. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa penerimaan dari Pajak Daerah berkontribusi 81,222% terhadap PAD pada tahun 2013. Pada tahun 2014, kontribusi Pajak Daerah mengalami sedikit penurunan yakni 79,75%, namun jumlah penerimaannya meningkat. Tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah meningkat daripada tahun sebelumnya, yakni 81,136%. Tahun 2016 dan 2017 penerimaan Pajak Daerah juga memiliki kontribusi yang baik, masing-masing sebesar 80,746% dan 82,836%.

Dari komponen Pajak Daerah tersebut yang menunjukkan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang terbesar bagi komponen Pajak Daerah. Selama tahun 2013 hingga 2017, Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 33,648%, 29,837%, 31,888%, 33,512%, DAN 33,998%. Rata-rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 32,58%. Angka ini sangat baik jika dibandingkan dengan penerimaan dari komponen PAD lainnya. Begitu pula dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, penerimaannya memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 hingga 2017 berturut-turut adalah 33,136%, 28,145%, 22,945%, 23,458%, dan 21,388%. Jika dihitung rata-ratanya, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini berkontribusi sebesar 25,81% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari sini dapat terlihat bahwa hal ini merupakan alasan mengapa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) selaku lembaga yang berkewenangan dalam melakukan pemungutan pajak daerah memprioritaskan keduanya untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua jenis pajak daerah ini merupakan yang paling potensial dalam meningkatkan penerimaan bagi daerah. Jika kedua jenis pajak daerah tersebut terus ditingkatkan penerimaannya, maka hal ini akan meningkatkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Jika penerimaannya baik, maka pengeluaran pemerintah, fasilitas dan pelayanan masyarakat, serta kebutuhan masyarakat Provinsi Jawa Timur akan dapat terpenuhi dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) seperti meningkatkan kegiatan pendataan dan penagihan pajak, pengiriman pemberitahuan akan kewajiban pemilik kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo secara *door to door*, Operasi Gabungan bersama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepolisian Daerah Jawa Timur dan PT. Jasa Raharja, SAMSAT Keliling, SAMSAT Corner, SAMSAT Drive Thru, SAMSAT *Payment Point*, SAMSAT Kepulauan, E-SAMSAT, SAMSAT ATM Jawa Timur, E-Smart, promosi melalui media sosial dan lain-lain merupakan inovasi yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Seluruh fasilitas dan pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memudahkan masyarakatnya dalam membayar pajak, merupakan salah satu bentuk perwujudkan dari pemanfaatan dana pajak itu sendiri. Pajak yang berasal dari masyarakat akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik seperti pelayanan yang telah disebutkan diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur

Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahunnya berbeda, hal ini dikarenakan setiap tahunnya rencana pembangunan dan rencana anggaran dari pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Target dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur kemudian diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur untuk direalisasikan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan target yang telah ditentukan dengan berbagai program, seperti sosialisasi ke masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, SAMSAT Keliling, SAMSAT Drive Thru, pembayaran pajak melalui gerai supermarket, E-Smart, dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk memudahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat melakukan pembayaran pajaknya sekaligus untuk mewujudkan target yang ditetapkan. Pemungutan kedua jenis pajak tersebut menggunakan asas *official assessment system* dimana pemerintah yang memiliki peran untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Realisasi dari kedua jenis pajak tersebut sudah sangat baik, mengingat dari tahun 2013 hingga 2017 realisasinya cenderung mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2013 mampu memenuhi target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 108,41%, tahun 2014 103,83%, tahun 2015 102,33%, tahun 2016 106,02%, dan tahun 2017 114,81%. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mampu merealisasikan pada tahun 2013 sebesar 109,63%, tahun 2014 101,62%, tahun 2015 sebesar 95,52%, tahun 2016 112,44%, dan tahun 2017 sebesar 106,48%. Hal ini tentunya berkat kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah yang berhasil mewujudkan realisasi penerimaan pajak daerah, sehingga berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur

Pengelolaan dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat mengingat adanya otonomi daerah, sehingga daerah memiliki wewenang untuk memanfaatkan aset yang dimiliki daerah itu sendiri untuk menggali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber-sumber pendapatan yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi sebesar 33,65% pada tahun 2013, tahun 2014 sebesar 29,84%, tahun 2015 sebesar 31,89%, tahun 2016 sebesar 33,51%, dan tahun 2017 sebesar 34%. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi sebesar 33,14% pada tahun 2013, tahun 2014 sebesar 28,15%, tahun 2015 sebesar 22,95%, tahun 2016 sebesar 23,46%, dan tahun 2017 sebesar 21,37%. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua jenis pajak tersebut merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk terus digali. Keduanya diharapkan mampu untuk terus meningkat penerimaannya sehingga akan meningkatkan pembangunan nasional berdasarkan otonomi daerah. Penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan fisik dan non fisik bagi Provinsi Jawa Timur sehingga fasilitas, pelayanan, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam proses penggalian dan pengelolaan dana untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), masyarakat harus dilibatkan dalam pemungutan pajak, retribusi, dan lain-lain yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi komponen PAD. Pemerintah harus terbuka dan tranparansi dalam dalam penggunaan dana PAD digunakan untuk apa saja, sehingga rasa kepercayaan masyarakat Provinsi Jawa Timur dapat meningkat sehingga akan berimbas baik kepada pemerintah daerah tersebut. Imbas baik yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah dengan adanya keterbukaan dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana, masyarakat semakin giat dan teratur dalam membayarkan kewajibannya yaitu berupa pajak, retribusi, dan lain-lain.

2. Bagi masyarakat Jawa Timur diharapkan bisa bekerjasama dengan baik dengan pemerintah daerah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan penerimaan pajak yang baik, maka pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan dan pembangunan yang baik pula untuk fasilitas masyarakat.
3. Bagi akademis diharapkan mampu memberikan hal yang baru dalam perkembangan ekonomi terhadap pemerintahan daerah sehingga pemerintah mampu untuk menjalankan program-program pengalokasian dana PAD dengan jujur, transparan, rapi, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat ditambahkan apakah peningkatkan jumlah kendaraan bermotor signifikan terhadap peningkatan pembangunan jalan raya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1 April 2010, Hlm. 46-62 diakses pada 13 November 2019.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

Badan Pusat Statistik. 2015. *"Statistik Transportasi Darat Tahun 2015"*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019

Banga, Wempy. 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Basya, Mohammad Fahmi. Kusni Hidayati, dan Widya Susanti. *"Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua terhadap Pendapatan Asli Kota Surabaya"*. Dalam Jurnal yang diakses pada 2 November 2019.

BPS Provinsi Jawa Timur. *Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017*. Dalam www.jatim.bps.go.id diakses pada 29 Oktober 2019.

Damayanti, Theresia Woro dan Supramono. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.

Djago, Maria Lidya Stephania. *"Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Periode 2009-2013 (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara"*. Dalam Jurnal yang diakses pada 2 November 2019.

Eresco. 1974. dalam Erly Suady, "*Hukum Pajak*". Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Hasanuddin dan Heince R. N. Wokas. *"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara"*. Dalam Jurnal yang diakses pada 5 November 2019.

Inggrini, Ratu. Jenny Morasa, dan Lidia Mawikere. 2018. "*Analisis Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sulawesi Utara"*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Volume 13 Nomor 3 diakses pada 2 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karina, Nurul dan Novi Budiarso. 2016. *"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo"*. Jurnal EMBA Volume 4 Nomor 1 diakses pada 30 Oktober 2019.

Kosim, E. 1988 dalam Jurnal Wacana Vol. XIII No. 2, 2014.

Lubis, Irwansyah. 2018. *Taat Hukum Pajak (Praktis dan Mudah Taat Aturan)*. Mitra Wacana Media.

Maharani, Christina Siwi. *"Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016"*. Dalam Jurnal yang diakses pada 2 November 2019.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si dalam GEMA Media Informasi dan Kebijakan Kampus, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html yang diakses pada 13 November 2019.

Rahayu, Betty. *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul*. Skripsi 2016.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungan*. Jakarta: Graha Ilmu.

Ratih Puspa, Christina. 2010. Jurnal "*Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*". Diakses pada 9 Desember 2019.

Rizal, Yani dan Miftahul Hidayah. 2018. *"Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh"*. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Volume 9 Nomor 1 diakses pada 30 Oktober 2019.

Rompis, Natalia Ester. Ventje Ilat, dan Anneke Wengkar. 2015. *"Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus pada SAMSAT Airmadidi)"*. Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi Volume 15 Nomor 03 diakses pada 29 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Simanjuntak, Timbul Hamongan dan Mukhlis Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Soeradi. 2014. *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suprayetno, Hero. *"Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara"*. Dalam Jurnal yang diakses pada 2 November 2019.

Tjahyono, Muhammad Bayu. *Reformasi Pajak Rakyat Dapat Apa*. Dalam www.pajak.go.id diakses pada 26 Oktober 2019.

Toding, Ronald Bua. 2016. *"Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya"*. Dalam Jurnal Volume 4 Nomor 1.

Utami, Ayu Triani. *"Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah"*. Dalam Jurnal yang diakses pada 5 November 2019.

Wibowo, Nur Setyo. 2015. *Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Vol 2 No. 4.

www.djpk.kemenkeu.go.id yang diakses pada 15 November 2019

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Budi Setijono, S.H., M.Si. Wawancara pada tanggal 9 Januari 2020

Ibu Yuni Arlini, S.E., MM. Wawancara pada tanggal 4 Februari 2020

Ibu Devia Hestina Arinda, S.STP. Wawancara pada tanggal 9 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id